



**INDIKATOR
KESEJAHTERAAN RAKYAT
KOTA PARIAMAN
2018**



**BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA PARIAMAN**



**INDIKATOR
KESEJAHTERAAN RAKYAT
KOTA PARIAMAN
2018**

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KOTA PARIAMAN 2018

ISBN : 978-602-1390-77-1

Nomor Publikasi : 13770.1912

Katalog : 4102004.1377

Ukuran Buku : 21 cm x 29,7 cm

Jumlah Halaman : xiv + 52 halaman

Naskah : Badan Pusat Statistik Kota Pariaman

Penyunting : Badan Pusat Statistik Kota Pariaman

Gambar Kulit : Badan Pusat Statistik Kota Pariaman

Diterbitkan oleh : © Badan Pusat Statistik Kota Pariaman

Dicetak oleh : CV. Graphic Dwipa

Ilustrasi Kover : Pasar Pariaman

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik Kota Pariaman

TIM PENYUSUN PUBLIKASI

Pengarah : Yuliandri, SE, MM
Penyunting : Agusman Suria, B.ST
Penulis : Rina Ramli, S.ST
Pengolah Data : Rina Ramli, S.ST
Design Cover dan Infografis : Rina Ramli, S.ST

<https://pariamankota.bps.go.id>

KATA PENGANTAR

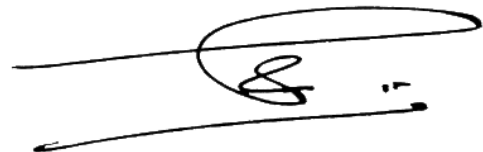
INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KOTA PARIAMAN 2018

merupakan publikasi tahunan Badan Pusat Statistik Kota Pariaman yang menyajikan tingkat perkembangan kesejahteraan rakyat Kota Pariaman antar waktu dan perbandingannya antar jenis kelamin. Data yang digunakan bersumber dari BPS dan dari Dinas Instansi di Kota Pariaman. Data BPS bersumber dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), dan Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035.

Publikasi ini menyajikan berbagai aspek kesejahteraan yang datanya tersedia dan terukur. Untuk memudahkan interpretasi, perubahan taraf kesejahteraan dikaji menurut delapan bidang yang mencakup Kependudukan, Kesehatan dan Gizi, Pendidikan, Ketenagakerjaan, Taraf dan Pola Konsumsi, Perumahan dan Lingkungan, Kemiskinan, serta Sosial Lainnya yang menjadi acuan dalam upaya peningkatan kualitas hidup.

Diharapkan publikasi ini bermanfaat, kami memberikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang berpartisipasi dalam penyusunan publikasi ini. Akhirnya, kami mengharapkan kritik dan saran demi perbaikan publikasi serupa di masa mendatang.

Pariaman, November 2019
Kepala BPS Kota Pariaman



Yuliandri, SE, MM

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	v
Daftar isi	vi
Daftar Tabel	viii
Daftar Gambar	x
Singkatan dan Akronim	xii
BAB 1 KEPENDUDUKAN	1
1.1 Jumlah Dan Laju Pertumbuhan Penduduk Serta Rasio Jenis Kelamin	3
1.2 Kepadatan Penduduk	4
1.3 Angka Beban Ketergantungan	5
1.4 Wanita Menurut Usia Kawin Pertama	6
1.5 Penggunaan Alat/Cara KB	6
BAB II KESEHATAN DAN GIZI	9
2.1 Derajat Dan Status Kesehatan Penduduk	11
2.2 Pemanfaatan Fasilitas Tenaga Kesehatan	12
BAB III PENDIDIKAN	15
3.1 Angka Melek Huruf	17
3.2 Rata-Rata Lama Sekolah	18
3.3 Tingkat Pendidikan	19
3.4 Tingkat Partisipasi Sekolah	19
BAB IV KETENAGAKERJAAN	23
4.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Dan Tingkat Pengangguran (TPT)	25
4.2 Tingkat Pengangguran Dan Tingkat Pendidikan	25
4.3 Lapangan Usaha Dan Status Pekerjaan	26
4.4 Jam Kerja	27
BAB V TARAF DAN POLA KONSUMSI	29
5.1 Pengeluaran Rumah Tangga	29
5.2 Distribusi Pendapatan	31
5.3 Konsumsi Energi Dan Protein	33

BAB VI PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN	35
6.1 Kualitas Rumah Tinggal	37
6.2 Fasilitas Rumah Tinggal	38
6.3 Status Kepemilikan Rumah	39
BAB VII KEMISKINAN	41
7.1 Jumlah Dan Persentase Penduduk Miskin	43
7.2 Garis Kemiskinan (Gk) Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2).	44
BAB VIII SOSIAL LAINNYA	47
8.1 Akses Pada Teknologi Komunikasi Dan Informasi	49
8.2 Tindak Kejahatan	50
8.3 Perlindungan Sosial	50

<https://pariamankota.bps.go.id>

DAFTAR TABEL

1.1	Jumlah dan Laju Petumbuhan Penduduk serta Rasio Jenis Kelamin Kota Pariaman, Tahun 2014-2018	4
1.2	Kepadatan Penduduk di Kota Pariaman, Tahun 2014 - 2018	4
1.3	Komposisi Penduduk (%), dan Angka Ketergantungan Kota Pariaman 2016-2018	5
2.1	Beberapa Indikator Kesehatan Kota Pariaman, 2017-2018	11
2.2	Persentase Balita Menurut Penolong Persalinan Kota Pariaman, 2017-2018	12
2.3	Persentase Penduduk yang Berobat Jalan Menurut Tempat Berobat (Persen) Kota Pariaman, 2016-2018	13
3.1	Pendidikan Tertinggi yang Tahun Keatas (Persen) Kota Pariaman, 2017-2018	19
3.2	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Usia Sekolah dan Jenis Kelamin di Kota Pariaman Tahun Tahun 2018	20
3.3	Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan dan, Jenis Kelamin di Kota Pariaman Tahun Tahun 2018	20
3.4	Rasio Guru-Murid di Kota Pariaman Tahun 2014-2018	21
3.5	Rasio Murid-Kelas di Kota Pariaman Tahun 2014-2018	21
4.1	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Jenis Kelamin di Kota Pariaman Tahun 2018	26
4.2	Persentase Pekerja Menurut Lapangan Usaha di Kota Pariaman Tahun 2017-2018	26
4.3	Persentase Penduduk Bekerja Menurut Status Pada Lapangan Usaha Utama di Kota Pariaman Tahun 2017-2018	27
4.4	Persentase Penduduk Bekerja Menurut Jam Kerja di Kota Pariaman Tahun 2017-2018	27
4.5	Tingkat Setengah Penganggur di Kota Pariaman Tahun 2017-2018	28
5.1	Pengeluaran Rata-rata Perkapita Sebulan Menurut Barang di Kota Pariaman, 2017-2018	32

5.2	Konsumsi Energi dan Protein per Kapita per Hari Kota Pariaman, 2016-2018	34
5.3	Jumlah Konsumsi Kalori dan Konsumsi Protein per Jenis Komoditi di Kota Pariaman, 2018	34
6.1	Rumah Tangga Menurut Beberapa Indikator Kualitas Rumah dan Tempat Tinggal di Kota Pariaman Tahun 2017 dan 2018	38
6.2	Persentase Rumah Tangga Menurut Beberapa Fasilitas Perumahan dan Daerah Tempat Tinggal di Kota Pariaman Tahun 2017 dan 2018	38
6.3	Persentase Rumah Tangga Menurut Status Kepemilikan dan Daerah Tempat Tinggal Di Kota Pariaman Tahun 2017 dan 2018	39
7.1	Perkembangan Penduduk Miskin di Kota Pariaman, 2014-2018	44
7.2	Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Tahun 2016-2018	44
8.1	Persentase Rumah Tangga yang Mempunyai Akses Teknologi Informasi Menurut Alat Komunikasi dan Informasi Kota Pariaman, 2017-2018	49
8.2	Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Mengakses Internet (Termasuk <i>Facebook</i> , <i>Twitter</i> , <i>BBM</i> , <i>Whatsapp</i>) dalam 3 Bulan Terakhir Menurut Jenis Kelamin, 2017 dan 2018	50
8.3	Persentase Penduduk yang Pernah Menjadi Korban Kejahatan di Kota Pariaman, 2017-2018	50
8.4	Persentase Rumah Tangga yang Membeli/Menerima Beras Miskin (Raskin) Selama 4 Bulan Terakhir Menurut Jumlah Beras yang Dibeli/Diterima, 2018	51
8.5	Persentase Rumah Tangga yang Menerima Kartu Perlindungan Sosial (KPS)/ Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), 2018	51
8.6	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki atau Menerima Jaminan Sosial Selama Setahun Terakhir Menurut dan Jenis Jaminan Sosial, 2018	52

DAFTAR GAMBAR

1.1	Tingkat Pertumbuhan Penduduk Kota Pariaman 2015-2018	3
1.2	Angka Beban Ketergantungan Kota Pariaman 2014-2018	5
1.3	Wanita Pernah Kawin Usia 10 Tahun Ke Atas Menurut Umur Perkawinan Pertama (persen) Kota Pariaman, Tahun 2017-2018	6
1.4	Persentase Perempuan Berumur 15 - 49 Tahun yang Kawin dan Pernah/Sedang Menggunakan Alat KB di Kota Pariaman, Tahun 2017-2018	6
2.1	Umur Harapan Hidup Kota Pariaman, 2016-2018	11
2.2	Persentase Penduduk yang Menggunakan Jaminan Kesehatan untuk Berobat Jalan Selama Sebulan Terakhir Kota Pariaman, 2018	13
2.3	Persentase Penduduk Berobat Jalan Selama Sebulan Terakhir Menurut Jenis Kelamin di Kota Pariaman Tahun 2018	14
2.4	Persentase Penduduk yang Sakit Tetapi Tidak Berobat Jalan selama Sebulan Terakhir Menurut Alasan Utama Tidak Berobat Jalan Kota Pariaman, 2018	14
3.1	Angka Melek Huruf Menurut Jenis Kelamin (persen) di Kota Pariaman Tahun 2017 dan 2018	18
3.2	Rata-rata lama Sekolah Penduduk Usia 25 Tahun ke Atas di Kota Pariaman, 2016-2018	18
4.1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin Kota Pariaman, Tahun 2017-2018	25
4.2	Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Jenis Kelamin Kota Pariaman, Tahun 2017-2018	25
4.3	Tingkat Pengangguran Terbuka dengan Pendidikan Minimal SMP di Kota Pariaman, Tahun 2017-2018	26
5.1	Persentase Pengeluaran Perkapita Sebulan Menurut Jenis Pengeluaran di Kota Pariaman, Tahun 2017 dan 2018	31
5.2	Distribusi Pengeluaran Penduduk dan Indeks Gini di Kota Pariaman Tahun 2017-2018	33

6.1	Gambar 6.1 Persentase Rumah Tangga Menurut Luas Lantai perkapita (m ²) di Kota Pariaman, 2017-2018	38
6.2	Persentase Rumah Tangga Menurut Status kepemilikan di Kota Pariaman Tahun 2017	39
7.1	Persentase Penduduk Miskin Kota Pariaman, Tahun 2014-2018	43
7.2	Jumlah Penduduk Miskin Kota Pariaman (ribu), Tahun 2014-2018	43
8.1	Persentase Rumah Tangga yang Menerima Kredit Usaha Selama Setahun Terakhir di Kota Pariaman Tahun 2016-2018	51

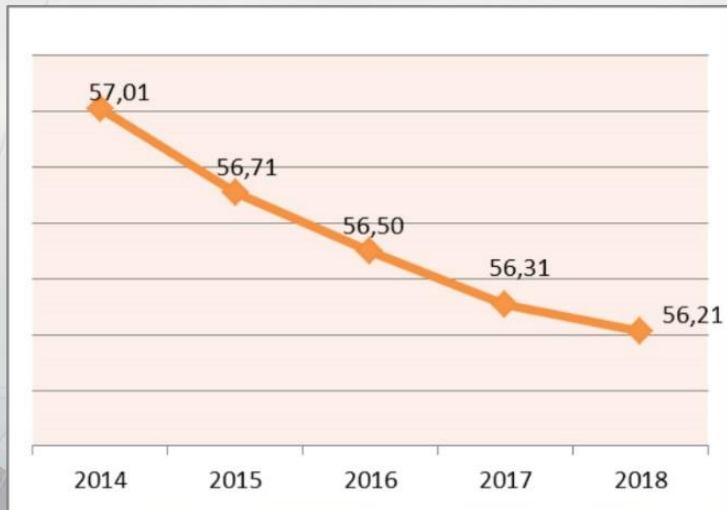
<https://pariamankota.bps.go.id>

SINGKATAN DAN AKRONIM

AKB	Angka Kematian Bayi
APM	Angka Partisipasi Murni
APS	Angka Partisipasi Sekolah
ASI	Air Susu Ibu
BPS	Badan Pusat Statistik
KB	Keluarga Berencana
Sakernas	Survei Angkatan Kerja Nasional
SD/PS	Sekolah Dasar
SM/SHS	Sekolah Menengah
SMP/JHS	Sekolah Menengah Pertama
SP	Sensus Penduduk
SUPAS	Survei Penduduk Antar Sensus
Susenas	Survei Sosial Ekonomi Nasional
TFR	Total Fertility Rate
TPAK	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
TPT	Tingkat Pengangguran Terbuka
GRR	Gross Reproductive Rate
NRR	Net Reproductive Rate
BKKBN	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
SDGs	Sustainable Development Goals
AKABA	Angka Kematian Balita
CDR	Crude Death Rate
IMR	Infant Mortality Rate
BPJS	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
UKBM	Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat
AMH	Angka Melek Huruf
APK	Angka Partisipasi Kasar
UNDP	United Nations Development Programme
IPM	Indeks Pembangunan Manusia
TSP	Tingkat Setengah Pengangguran

GK	Garis Kemiskinan
ART	Anggota Rumah Tangga
KRT	Kepala Rumah Tangga

<https://pariamankota.bps.go.id>



Angka Ketergantungan Kota Pariaman Tahun 2014-2018

Angka beban ketergantungan pada tahun 2018 sebesar 56,21 berarti setiap 100 orang penduduk produktif menanggung 56 orang penduduk tidak produktif yang terdiri dari anak-anak dan lansia.

<https://pariaman.go.id>

BAB I KEPENDUDUKAN

1. KEPENDUDUKAN

Isu kependudukan yang sering dibicarakan akhir-akhir ini adalah tentang bonus demografi. Bonus demografi dimana keadaan jumlah penduduk usia produktif (15- 64 tahun) lebih banyak dari penduduk usia non produktif (usia kurang dari 15 tahun dan usia 65 tahun keatas) atau bonus demografi terjadi apabila angka beban tanggungan dibawah 50 artinya keadaan dimana jumlah penduduk usia produktif 2 kali lipat atau lebih dari jumlah penduduk non produktif.

Pada saat itu jelas penduduk usia produktif jauh lebih banyak dari pada penduduk yang tidak produktif dan sekarang kita akan menuju era tersebut. Kondisi ini hanya terjadi sekali dalam rentang siklus kehidupan suatu bangsa dan sangat ditunggunya untuk dapat dijadikan momentum untuk mencapai pembangunan lebih cepat lagi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Hasil proyeksi penduduk 2010-2020 menunjukkan bahwa pada tahun 2018 angka beban tanggungan penduduk Kota Pariaman sebesar 56. Menurut hasil proyeksi penduduk, Pariaman baru akan memasuki era bonus demografi setelah tahun 2035. Peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi kunci untuk meraih peluang bonus demografi untuk benar-benar meningkatkan pembangunan secara signifikan, tetapi kalau tidak diikuti dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia maka jumlah penduduk usia produktif yang banyak hanya akan menjadi beban dalam proses pembangunan

Disamping itu cepat atau lambatnya suatu daerah mencapai era bonus demografi sangat ditentukan juga oleh laju

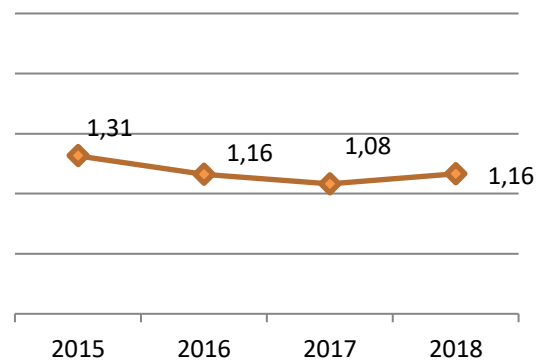
pertumbuhan penduduk, terutama laju pertumbuhan penduduk usia muda.

1.1 JUMLAH DAN LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK SERTA RASIO JENIS KELAMIN

Dari hasil penghitungan proyeksi penduduk menunjukkan jumlah penduduk Kota Pariaman tahun 2018 mencapai 87,6 ribu jiwa. Jumlah penduduk tersebut meningkat sebesar 1,16 persen dari tahun 2017 yang berjumlah 86,6 ribu jiwa.

Semakin besar jumlah penduduk, Kota Pariaman dihadapkan pada masalah kependudukan yang cukup kompleks. Meningkatnya jumlah penduduk tentunya akan berdampak pada munculnya permasalahan dalam hal kependudukan. Semakin banyak jumlah penduduk, maka dalam penentuan kebijakan semakin banyak yang perlu dipertimbangkan dalam hal penyediaan berbagai sarana dan prasarana atau fasilitas-fasilitas umum agar kesejahteraan penduduk terjamin.

Gambar 1.1 Tingkat Pertumbuhan Penduduk Kota Pariaman 2015-2018



Sumber: Proyeksi Penduduk 2015-2018

Jumlah penduduk Kota Pariaman terus bertambah hingga mencapai 87,6 ribu jiwa tahun 2018. Dibandingkan dengan hasil sensus penduduk tahun 2010 jumlah penduduk Kota Pariaman telah bertambah

KEPENDUDUKAN

sekitar 8,3 ribu orang atau meningkat 10,48 persen selama delapan tahun terakhir.

Tabel 1.1 Jumlah dan Laju Petumbuhan Penduduk serta Rasio Jenis Kelamin Kota Pariaman, Tahun 2014-2018

Tahun	Jumlah Penduduk	LPP per Tahun (%)	Rasio Jenis Kelamin
(1)	(2)	(3)	(4)
2014	83.610	1,18	97,29
2015	84.709	1,31	97,36
2016	85.691	1,16	97,42
2017	86.618	1,08	97,55
2018	87.626	1,16	97,58

Sumber: Proyeksi Penduduk 2014-2018

Dilihat dari laju pertumbuhan penduduk Kota Pariaman angkanya terus menunjukkan penurunan. Selama periode 2013-2014 secara rata-rata laju pertumbuhan penduduknya mencapai 1,18 persen pertahun. Kemudian dari tahun 2014-2015 dan 2015-2016 laju pertumbuhan masih cukup tinggi yaitu sebesar 1,31 persen dan 1,16 persen. Selanjutnya laju pertumbuhan penduduk turun naun kembali meningkat di tahun 2018 menjadi 1,16 persn.

Komposisi penduduk Kota Pariaman menurut jenis kelamin berada di angka kurang dari seratus. Kota Pariaman dikenal dengan ciri demografi dimana jumlah penduduk perempuan lebih banyak dari penduduk laki-laki, hal ini ditandai rasio jenis kelamin dibawah seratus.

Namun perkembangan beberapa tahun terakhir rasio jenis kelamin terus meningkat seiring bertambahnya proporsi jumlah penduduk laki-laki hingga tahun 2018 mencapai angka 97,58 yang berarti

pada setiap 100 orang penduduk perempuan terdapat 97 orang penduduk laki-laki.

1.2 KEPADATAN PENDUDUK

Diwilayah penduduk yang besar akan dihadapkan persoalan meningkatnya jumlah pengangguran, permasalahan kebutuhan untuk pemukiman serta tidak memadainya akses fasilitas pendidikan dan kesehatan serta masalah sosial lainnya. Disisi lain diwilayah penduduk yang relatif sedikit akan memunculkan persoalan optimalisasi sumberdaya alam terkait dengan kekurangan tenaga kerja.

Tabel 1.2 Kepadatan Penduduk di Kota Pariaman, Tahun 2014-2018

Tahun	Kepadatan Penduduk
(1)	(2)
2014	1.140
2015	1.155
2016	1.168
2017	1.181
2018	1.195

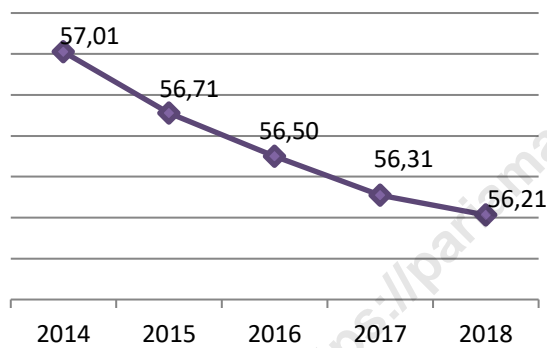
Sumber: Proyeksi Penduduk 2014-2018

Secara umum, tingkat kepadatan penduduk di Kota Pariaman pada tahun 2018 relatif cukup padat jika dibandingkan dengan kabupaten lainnya di Provinsi Sumatera Barat. Dengan luas wilayah Kota Pariaman sebesar 73,36 kilo meter persegi dan jumlah penduduk di tahun 2018 sebesar 87.626 jiwa, berarti secara rata-rata kepadatan penduduk di Kota Pariaman sebesar 1.195 jiwa per kilo meter persegi, yang berarti dalam setiap 1 km² luas kota Pariaman ditempati oleh sebanyak 1.195 jiwa penduduk.

1.3 ANGKA BEBAN KETERGANTUNGAN

Angka Beban Ketergantungan (*Dependency Ratio*) merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tinggi angka beban ketergantungan menunjukkan semakin besar tanggungan penduduk produktif untuk membiayai penduduk tidak produktif. Sebaliknya semakin rendah angka ketergantungan menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk produktif untuk membiayai penduduk yang tidak produktif.

Gambar 1.2 Angka Beban Ketergantungan Kota Pariaman 2014-2018



Sumber: Proyeksi Penduduk 2014-2018

Angka beban ketergantungan pada tahun 2018 sebesar 56,21 berarti setiap 100 orang penduduk produktif menanggung 56 orang penduduk tidak produktif yang terdiri dari anak-anak dan lansia. Menurunnya angka beban ketergantungan juga dapat menggambarkan bahwa jumlah penduduk produktif yang semakin meningkat relatif terhadap jumlah penduduk yang tidak produktif. Jika kecenderungan penurunan angka beban ketergantungan terus berlangsung, maka diharapkan Indonesia khususnya Kota Pariaman akan segera mencapai fase ketika rasio ketergantungan mencapai titik terendah (*windows of opportunity*).

Angka beban ketergantungan juga dapat menunjukkan tanda-tanda adanya bonus demografi yaitu angka ketergantungan di bawah 50 yang berarti bahwa satu orang penduduk tidak produktif ditanggung oleh 1-2 orang penduduk produktif. Seperti diketahui bahwa bonus demografi terjadi apabila mayoritas penduduk Indonesia adalah usia angkatan kerja 15-64 tahun, dimana penduduk pada kelompok ini menjadi potensial bagi Indonesia untuk menjadi negara maju apabila sumber daya manusianya berkualitas. Sebaliknya, akan menjadi bumerang jika kualitas sumber daya manusia penduduk produktif itu rendah (Grand Design Pembangunan Kependudukan Tahun 2011-2035).

Tabel 1.3 Komposisi Penduduk (%), dan Angka Ketergantungan Kota Pariaman 2016-2018

Tahun	Kelompok Umur (Tahun)			Rasio Ketergantungan
	0-14	15-64	65+	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2016	29,75	63,90	6,35	56,50
2017	29,54	63,98	6,48	56,31
2018	29,34	64,02	6,64	56,21

Sumber: Proyeksi Penduduk 2016-2018

Proporsi penduduk umur produktif di Kota Pariaman merupakan yang terbesar dan cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2017 komposisi penduduk usia produktif sebesar 63,98 persen dan meningkat menjadi 64,02 persen di tahun 2018. Sementara komposisi usia 0-14 tahun menurun dari 29,54 persen menjadi 29,34 persen. Namun hal sebaliknya terjadi pada komposisi penduduk usia 65 tahun keatas mengalami peningkatan dari 6,48 persen menjadi 6,64

persen. Hal inilah yang menyebabkan angka beban ketergantungan penduduk Kota Pariaman terus mengalami penurunan setiap tahunnya. Tercatat pada tahun 2017 angka beban ketergantungan sebesar 56,31 persen dan turun menjadi 56,21 persen pada tahun 2018.

1.4 WANITA MENURUT USIA KAWIN PERTAMA

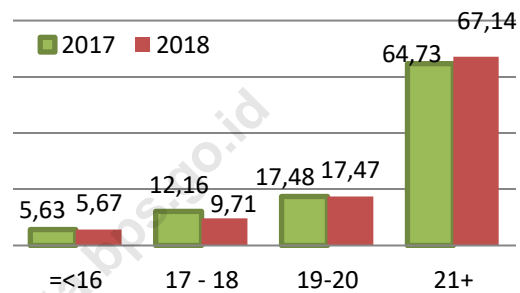
Salah satu yang dapat memicu penambahan jumlah penduduk yaitu tingginya angka kelahiran di suatu daerah. Banyaknya kelahiran yang terjadi pada seorang wanita dapat dipengaruhi oleh masa reproduksinya. Semakin panjang masa reproduksi seorang wanita, kemungkinan semakin banyak anak yang dilahirkan. Semakin muda usia seseorang saat melaksanakan perkawinan pertama maka akan semakin panjang masa reproduksinya.

Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pada pasal 7 ayat (1), syarat menikah untuk perempuan harus sudah berusia minimal 16 tahun, sedangkan menurut Undang-Undang Perlindungan Anak usia minimal untuk menikah yaitu sudah berumur 18 tahun. Sementara itu, menurut Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) usia pernikahan pertama bagi seseorang idealnya adalah 21-25 tahun.

Berdasarkan hasil Susenas tahun 2018, persentase wanita Kota Pariaman yang melakukan perkawinan pertamanya di bawah usia 16 tahun sebesar 5,67 persen atau mengalami sedikit kenaikan dari tahun sebelumnya yang sebesar 5,63 persen. Sebagian besar wanita melakukan perkawinan pertama pada usia 21 tahun ke atas dan persentasenya terus meningkat,

dari 64,73 persen pada tahun 2017 menjadi 67,14 persen pada tahun 2018. Sebaliknya persentase wanita yang melakukan perkawinan pertama pada usia 17-20 tahun turun dari 29,64 persen di tahun 2017 menjadi 27,18 persen di tahun 2018.

Gambar 1.3 Wanita Pernah Kawin Usia 10 Tahun Ke Atas Menurut Umur Perkawinan Pertama (persen) Kota Pariaman, Tahun 2017-2018



Sumber: BPS, Susenas 2017-2018

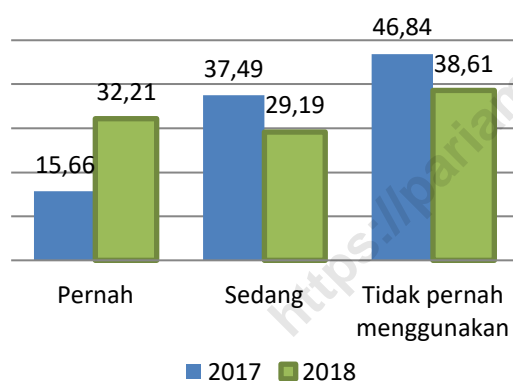
1.5 PENGGUNAAN ALAT/CARA KB

Program Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu program pemerintah yang bertujuan untuk menekan laju pertumbuhan penduduk, mengurangi angka kelahiran anak dan kematian ibu. Program KB dilakukan dengan penggunaan alat kontrasepsi/ KB yang berbagai jenis/macamnya. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) selaku instansi pemerintah yang menangani program KB ini mengharapkan cakupan akseptor KB terus meningkat. Terutama untuk kepesertaan KB dengan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) seperti IUD dan Implant. Dengan cakupan KB yang meningkat, diharapkan laju pertumbuhan penduduk bisa dikendalikan lebih baik lagi.

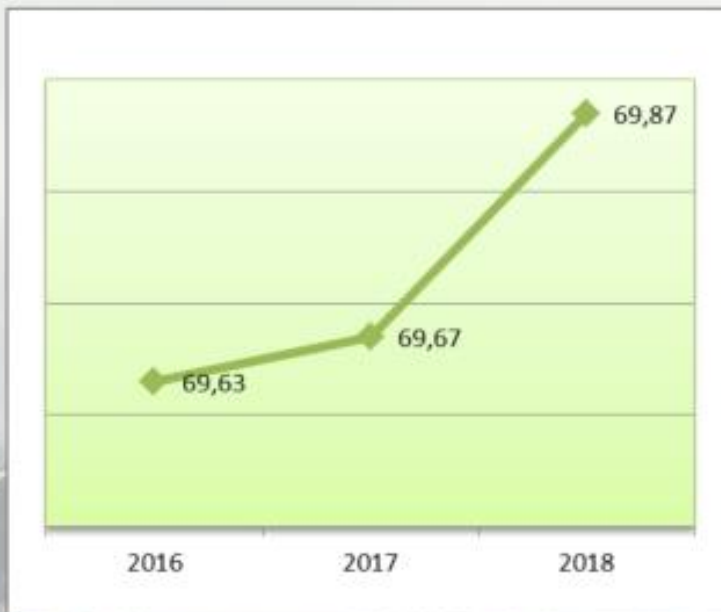
Berdasarkan hasil Susenas tahun 2017-2018, terlihat bahwa persentase wanita berumur 15-49 tahun yang berstatus

kawin yang sedang menggunakan alat/cara KB adalah sebesar 37,49 persen pada tahun 2017 dan turun menjadi 29,19 persen pada tahun 2018. Sebaliknya persentase wanita yang pernah ber KB namun sudah berhenti meningkat dari 15,66 persen menjadi 32,21 persen di tahun 2018. Wanita yang tidak pernah menggunakan alat/cara KB menurun dari 46,84 persen menjadi 38,61 persen. Dapat disimpulkan dalam beberapa tahun terakhir persentase wanita yang memakai alat/cara KB meningkat namun sebagiannya sudah berhenti menggunakannya di tahun 2018.

Gambar 1.4 Persentase Perempuan Berumur 15 - 49 Tahun yang Kawin dan Pernah/Sedang Menggunakan Alat KB di Kota Pariaman, Tahun 2017-2018



Sumber: BPS, Susenas 2017-2018



Umur Harapan Hidup Tahun 2016-2018

Umur harapan hidup pada tahun 2018 sebesar 69,87 berarti penduduk yang lahir tahun 2018 dapat menjalani usianya hingga berumur 69,87 tahun

BAB II KESEHATAN DAN GIZI

2. KESEHATAN DAN GIZI

Sustainable Development Goals (SDGs) adalah sebuah komitmen bersama masyarakat internasional untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang merupakan perpanjangan program tujuan pembangunan milenium. Salah satu tujuan SDGs yaitu menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan hidup untuk seluruh masyarakat disegala umur, diantaranya dengan melakukan berbagai program kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat khususnya memberikan kemudahan akses pelayanan publik seperti puskesmas yang sasaran utamanya menurunkan angka kematian bayi dan balita, menurunkan angka kesakitan masyarakat, menurunkan prevalensi gizi buruk dan gizi kurang, serta meningkatkan angka harapan hidup.

2.1 DERAJAT DAN STATUS KESEHATAN PENDUDUK

Merujuk pada konsep yang diterapkan oleh BPS dalam Susenas, maka Morbiditas (angka kesakitan) menunjukkan adanya gangguan/ keluhan kesehatan yang mengakibatkan terganggunya aktivitas bersekolah, mengurus rumah tangga maupun aktivitas lainnya. Pada umumnya keluhan kesehatan yang mengindikasikan adanya suatu penyakit yang biasa dialami oleh penduduk adalah panas, batuk, pilek, asma/napas sesak, diare, sakit kepala berulang, sakit gigi, campak, dll. Semakin banyak penduduk yang mengalami gangguan kesehatan berarti semakin rendah derajat kesehatan di wilayah tersebut dan menunjukkan angka kesakitan yang tinggi di wilayah tersebut (penduduknya banyak yang mengalami sakit).

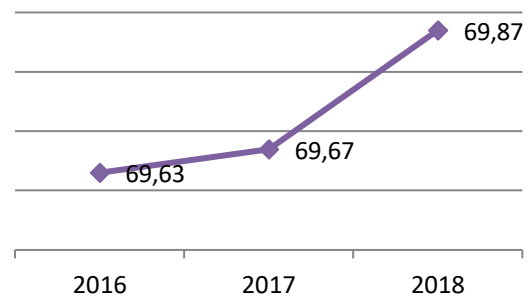
Tabel 2.1 Beberapa Indikator Kesehatan Kota Pariaman, 2017-2018

Indikator	2017	2018
(1)	(2)	(3)
Angka Kesakitan (%)	28,81	33,89

Sumber: BPS, Susenas 2017-2018

Akibat kurangnya pengetahuan mengenai kesehatan membuat seseorang memiliki pola hidup yang tidak sehat sehingga lama kelamaan akan mengalami gangguan kesehatan. Keluhan kesehatan ini dapat mengakibatkan terganggunya aktivitas bekerja, sekolah dan kegiatan sehari-hari lainnya yang selanjutnya disebut sebagai kesakitan/morbiditas. Hasil Susenas tahun 2018 menunjukkan Angka Kesakitan penduduk Kota Pariaman mencapai 33,89 persen, atau mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang hanya 28,81 persen. Meningkatnya angka morbiditas pada tahun 2018 dapat dikatakan sebagai kondisi kesehatan yang menurun, dan terjadi peningkatan rata-rata lama sakit penduduk.

Gambar 2.1 Umur Harapan Hidup Kota Pariaman, 2016-2018



Sumber: BPS, Susenas 2016-2018

Sumber data untuk harapan hidup pada publikasi ini merujuk pada angka hasil proyeksi penduduk. Angka harapan hidup masyarakat di Kota Pariaman mengalami peningkatan seiring dengan membaiknya pola perilaku hidup sehat dan kondisi sosial ekonomi masyarakat, tercatat rata-rata penduduk Kota Pariaman yang lahir tahun

2016 akan dapat menjalani kehidupannya hingga usia 69,63 tahun dan untuk penduduk yang lahir tahun 2018 dapat menjalani usianya hingga 69,87 tahun.

2.2 PEMANFAATAN FASILITAS TENAGA KESEHATAN

Untuk menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) salah satunya adalah dengan meningkatkan pertolongan persalinan oleh tenaga medis dan meningkatkan pelayanan neonatal, karena dapat mempengaruhi keselamatan ibu dan bayinya. Penolong persalinan yang ideal adalah tenaga medis karena mereka telah menerapkan proses persalinan yang memenuhi standar kesehatan. Oleh sebab itu, pemerintah selalu berupaya untuk memperluas akses, sarana pelayanan serta tenaga kesehatan dengan cara meningkatkan jumlah maupun kualitasnya. Salah satu programnya meningkatkan pelayanan kebidanan dengan menempatkan bidan di desa-desa, seperti yang tercantum dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2010-2014 telah ditetapkan dalam Perpres No. 5 tahun 2010 yaitu meningkatkan pengembangan dan pendayagunaan SDM kesehatan yang merata dan bermutu.

Usaha pemerintah dalam menyediakan tenaga kesehatan ternyata memperlihatkan hasil yang baik, dimana persentase balita yang kelahirannya ditolong oleh tenaga kesehatan meningkat sudah mencapai 100 persen artinya hampir tidak ditemukan penolong persalinan oleh tenaga dukun bayi atau lainnya di Kota Pariaman.

Dari tabel berikut terlihat tenaga kesehatan penolong persalinan di Kota Pariaman tahun 2018 adalah dokter sebesar 63,72 persen kemudian bidan sebesar 36,72

persen. Dapat dikatakan bahwa tingkat kesadaran masyarakat Kota Pariaman cukup tinggi terhadap pentingnya tenaga kesehatan dalam menolong proses persalinan dibandingkan dengan yang bukan tenaga kesehatan.

Tabel 2.2 Persentase Balita Menurut Penolong Persalinan Kota Pariaman, 2017-2018

Penolong Proses Kelahiran Terakhir	2017	2018
(1)	(2)	(3)
Dokter Kandungan dan Umum	43,10	63,72
Bidan	53,21	36,28
Lainnya	3,69	0,00
Bukan Tenaga Kesehatan	0,00	0,00
Dukun Tradisional	0,00	0,00
Lainnya	0,00	0,00

Sumber: BPS, Susenas 2017-2018

Akses penduduk dalam memanfaatkan tenaga kesehatan tidak hanya dilihat dari indikator penolong persalinan tetapi juga dapat dilihat dari ketersediaan/kemudahan mencapai fasilitas/tempat dan tenaga kesehatan sebagai rujukan penduduk jika mengalami keluhan sakit hingga harus pergi berobat. Sejak diterapkannya BPJS secara nasional mulai Januari tahun 2014 yang lalu, diharapkan dapat membuka akses dan peluang yang lebih besar kepada masyarakat secara umum untuk mendapatkan haknya dalam hal pelayanan kesehatan.

Persentase penduduk yang berobat ke rumah sakit pemerintah maupun swasta meningkat dari 13,73 persen pada tahun 2017 menjadi 17,93 persen tahun 2018. Begitu pula dengan pemanfaatan klinik/praktek dokter bersama. Hal ini berkaitan dengan sudah banyaknya klinik yang melayani pasien BPJS di Kota

Pariaman. Peningkatan jumlah pasien ke rumah sakit Kota Pariaman juga disebabkan oleh adanya jaminan kesehatan pemerintah daerah bagi warga Kota Pariaman yang memiliki KTP Pariaman.

Tabel 2.3 Persentase Penduduk yang Berobat Jalan Menurut Tempat Berobat (Persen) Kota Pariaman, 2016-2018

Indikator	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(3)
Persentase penduduk yang berobat jalan	69,54	59,67	64,04
Persentase penduduk yang berobat jalan menurut tempat berobat			
Rumah sakit	12,71	13,73	17,93
Praktek Dokter/bidan	44,70	37,60	32,21
Klinik/Praktek dokter bersama	10,22	12,12	14,83
Puskesmas	30,51	34,95	37,88
UKBM	7,26	3,65	1,65
Praktek Pengobatan Tradisional	1,35	2,59	1,18
Dukun Bersalin/Lainnya	1,14	0,00	0,00

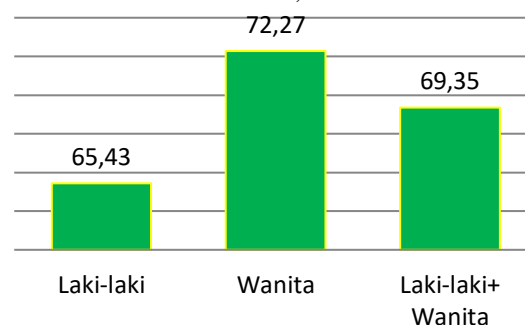
Sumber: BPS, Susenas 2016 – 2018

Puskesmas merupakan sarana kesehatan yang paling banyak dikunjungi oleh masyarakat Kota Pariaman untuk berobat. Pada tahun 2018, persentase penduduk yang berobat ke puskesmas sebesar 37,88 meningkat dibandingkan tahun 2017 yang hanya sebesar 34,95 persen.

Dengan meningkatnya jumlah masyarakat mendatangi fasilitas kesehatan yang menerima jaminan kesehatan, pemanfaatan praktek dokter/bidan mengalami penurunan dari 37,60 persen di tahun 2017 menjadi 32,21 persen di tahun 2018. Demikian pula kunjungan ke praktek pengobatan tradisional berkurang dari 2,59 persen di tahun 2017 menjadi hanya 1,18 persen di tahun 2018.

Pemilikan jaminan kesehatan sangat diperlukan agar penduduk tidak mengalami kendala dalam mengakses fasilitas kesehatan, terutama kendala yang berkaitan dengan kendala biaya. Sejak tahun 2011 pemerintah Kota Pariaman telah memberikan Jaminan Kesehatan Sabiduk Sadayuang (JKSS) bagi masyarakat yang tidak mendapatkan Jamkesmas. Dengan demikian pemerataan jaminan kesehatan di Kota Pariaman telah didapat oleh masyarakat. Namun tidak semua masyarakat Kota Pariaman yang memanfaatkan jaminan kesehatan yang dimiliki. Pada tahun 2018 terdapat 69,35 persen penduduk yang menggunakan jaminan kesehatan dan persentase perempuan yang menggunakan lebih besar daripada laki-laki yaitu 72,27 persen berbanding 65,43 persen.

Gambar 2.2 Persentase Penduduk yang Menggunakan Jaminan Kesehatan untuk Berobat Jalan Selama Sebulan Terakhir Kota Pariaman, 2018

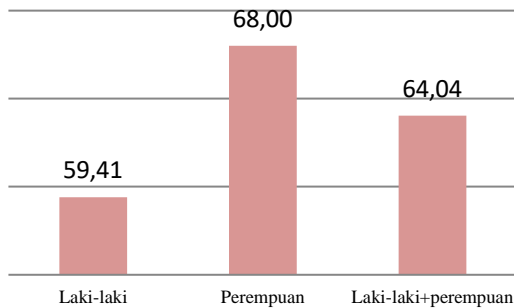


Sumber: BPS, Susenas 2018

Gambar 2.3 menunjukkan pada tahun 2018 terdapat sebanyak 64,04 persen penduduk yang mengalami keluhan kesehatan di Kota Pariaman memanfaatkan sarana kesehatan untuk berobat. Dan angka ini meningkat di banding tahun sebelumnya yang hanya sebesar 59,67 persen (Tabel 2.3). Berdasarkan jenis kelamin, perempuan lebih banyak yang pergi berobat

dibandingkan laki-laki, yaitu 68,00 persen berbanding 59,41 persen.

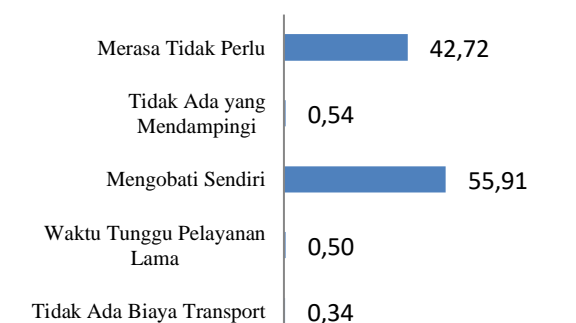
Gambar 2.3 Persentase Penduduk Berobat Jalan Selama Sebulan Terakhir Menurut Jenis Kelamin di Kota Pariaman, Tahun 2018



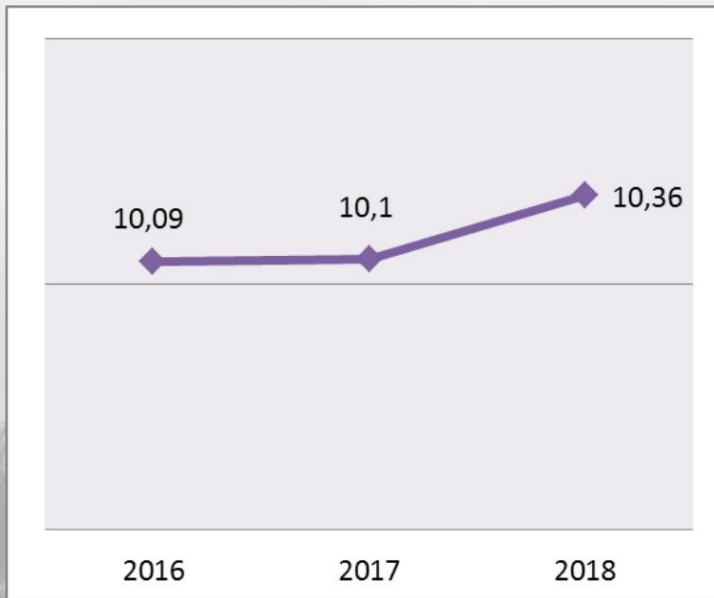
Sumber: BPS, Susenas 2018

Terdapat 35,96 persen penduduk yang sakit namun tidak pergi berobat, disebabkan oleh berbagai alasan. Diantara alasan paling banyak penduduk tidak berobat adalah karena mengobati sendiri sakitnya sebesar 55,91 persen dan karena merasa tidak perlu berobat sebanyak 42,72 persen. Namun terdapat juga alasan penduduk tidak berobat disebabkan tidak ada yang menemani sebanyak 0,54 persen, waktu tunggu pelayanan yang lama sebanyak 0,50 persen dan disebabkan tidak ada biaya transpor sebanyak 0,34 persen.

Gambar 2.4 Persentase Penduduk yang Sakit Tetapi Tidak Berobat Jalan selama Sebulan Terakhir Menurut Alasan Utama Tidak Berobat Jalan Kota Pariaman, 2018



Sumber: BPS, Susenas 2018



Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2016-2018

Rata-rata Lama Sekolah di Kota Pariaman tahun 2018 sebesar 10,36 tahun. Dengan kata lain penduduk di Kota Pariaman sudah bisa menikmati pendidikan rata-rata sampai kelas 1 SMA

BAB III PENDIDIKAN

3. PENDIDIKAN

Pendidikan merupakan kunci utama pembangunan manusia dan kemajuan suatu bangsa. Budaya berpikir kritis, ilmiah, dan inovatif hanya dapat tumbuh melalui pendidikan yang baik, seperti halnya pembangunan karakter, peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan daya saing individu maupun bangsa. Kini, setelah 73 tahun merdeka, kita bisa menyaksikan sektor pendidikan yang berkembang kian baik. Ihwal tingkat buta aksara di masyarakat, misalnya, telah menurun tajam. Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk bidang Pendidikan dan Kebudayaan (UNESCO) memberikan penghargaan kepada Indonesia atas capaian dalam bidang kemampuan membaca dan menulis (literasi), yaitu sebesar 95 persen pada 2012. Itu artinya angka buta huruf tinggal 5 persen atau hampir mendekati Singapura. Angka tersebut tentu tak punya makna apa-apa jika Indonesia tak bisa menghadapi masalah kesenjangan kualitas dan kuantitas sumber daya pendidikan di perkotaan dan perdesaan.

Program wajib belajar secara menyeluruh pada level pendidikan dasar di Indonesia merupakan keputusan politik yang tak dapat diabaikan. Asumsi yang mendasari pentingnya keputusan politik tersebut, secara legal formal tertuang dalam Undang-Undang No.20 Tahun 2003 pasal 6 ayat (1) yang menyatakan bahwa "setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar". Hal ini penting sebagai suatu batas minimal bagi seseorang agar dapat hidup secara efektif, efisien dan produktif di dalam masyarakat. Melalui wajib belajar sembilan tahun berarti bahwa

semua warga negara yang berumur 9-15 tahun akan di persiapkan sedemikian rupa melalui pendidikan untuk kelak menjadi warga negara yang dapat memainkan perannya secara terbuka dan demokratis. Mengingat strata kelompok ini cukup besar dan cenderung bertambah, maka kehadirannya menjadi penting untuk diperhitungkan. Beberapa indikator output yang dapat menunjukkan kualitas pendidikan antara lain Angka Melek Huruf (AMH), Rata-rata lama sekolah, Tingkat Pendidikan, Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). Indikator input pendidikan salah satunya adalah fasilitas pendidikan.

3.1 ANGKA MELEK HURUF

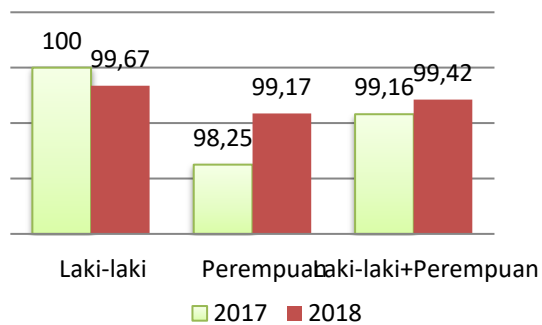
Kemampuan penduduk dalam membaca dan menulis merupakan suatu ukuran yang paling mendasar dari tingkat pendidikan, karena membaca dan menulis merupakan pintu gerbang masuknya berbagai ilmu dalam kehidupan seseorang. Sehingga tanpa penguasaan terhadap kemampuan dasar tersebut, bisa dikatakan akan sangat sulit untuk bisa menguasai ilmu yang lebih tinggi lagi. Uraian diatas mempertegas bahwa indikator ini dapat menjadi suatu ukuran yang menunjukkan tingkat pendidikan penduduk di suatu wilayah.

Definisi angka melek huruf (*literacy rate*) adalah persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang bisa membaca dan menulis serta mengerti sebuah kalimat sederhana dalam hidupnya sehari-hari. Angka melek huruf (AMH) ini seringkali dijadikan sebagai suatu ukuran kemampuan penduduk di suatu daerah dalam menyerap informasi dari berbagai media yang ada, selain itu angka tersebut juga

PENDIDIKAN

mencerminkan perkembangan tingkat intelektual penduduk yang tinggal di wilayah tersebut. Sehingga tidak salah jika menggunakan angka ini sebagai suatu alat ukur evaluasi dari program-program pemerintah di bidang pendidikan.

Gambar 3.1 Angka Melek Huruf Menurut Jenis Kelamin (persen) di Kota Pariaman Tahun 2017 dan 2018



Sumber: BPS, Susenas 2018

Pada tahun 2018 masih ada sekitar 0,58 persen penduduk usia 15 tahun ke atas yang tidak dapat membaca dan menulis huruf latin, artinya bahwa dari 100 penduduk usia 15 tahun ke atas terdapat sekitar 1 orang yang tidak dapat membaca dan menulis huruf latin. Dibandingkan dengan tahun 2017, AMH penduduk usia 15 tahun ke atas pada tahun 2018 mengalami peningkatan. Berdasarkan jenis kelamin angka melek huruf penduduk laki-laki masih lebih tinggi bila dibandingkan dengan penduduk perempuan.

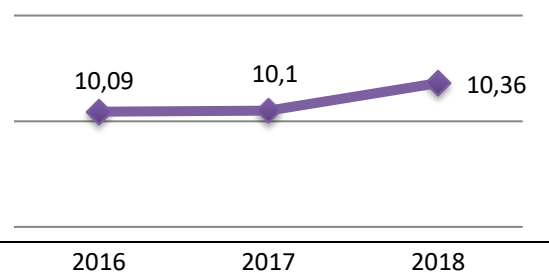
3.2 RATA-RATA LAMA SEKOLAH

Rata-rata lama sekolah merupakan rata-rata lamanya pendidikan yang telah ditempuh oleh sekelompok orang dewasa (usia >25 tahun) di suatu wilayah. Rata-rata lama sekolah merupakan indikator yang telah ditetapkan oleh UNDP pada tahun 1990 untuk penyusunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Lama

sekolah seseorang dihitung berdasarkan jenjang dan jenis pendidikan tertinggi yang pernah/sedang diduduki dengan tingkat/kelas tertinggi yang pernah/sedang diduduki oleh seseorang. Sebagai gambaran, seseorang yang telah menamatkan pendidikan sampai tingkat SD maka ia telah memiliki lama sekolah sebanyak 6 tahun, tamat SLTP adalah 9 tahun dan seterusnya. Perhitungan lama sekolah tidak memperhatikan apakah seseorang menamatkan sekolah lebih cepat atau lebih lama dari waktu yang telah ditetapkan.

Angka lama sekolah dapat juga digunakan untuk monitoring pelaksanaan Program Wajib Belajar 9 Tahun yang dicanangkan oleh pemerintah. Artinya untuk melewati target program tersebut maka rata-rata lama sekolah harus sudah mencapai 9 tahun.

Gambar 3.2 Rata-rata lama Sekolah Penduduk Usia 25 Tahun ke Atas di Kota Pariaman, 2016-2018



Sumber: BPS, Susenas 2016-2018

Rata-rata Lama Sekolah di Kota Pariaman tahun 2018 sebesar 10,36 tahun. Dengan kata lain penduduk di Kota Pariaman sudah bisa menikmati pendidikan rata-rata sampai kelas 1 SMA. Angka tersebut dapat dikatakan sudah mencapai target Program Wajib Belajar yang dicanangkan pemerintah yaitu menyelesaikan pendidikan dasar selama 9 tahun. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya rata-rata lama sekolah di Kota

Pariaman tahun 2018 mengalami kenaikan dari 10,10 tahun di tahun 2017 menjadi 10,36 tahun di tahun 2018. Diharapkan Kota Pariaman dapat mencapai rata-rata usia sekolah hingga perguruan tinggi untuk pembentukan SDM yang berkualitas.

3.3 TINGKAT PENDIDIKAN

Pemenuhan atas hak untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu merupakan ukuran keadilan dan pemerataan atas hasil pembangunan dan sekaligus merupakan investasi sumber daya manusia yang diperlukan untuk mendukung keberlangsungan pembangunan. Pemerataan, akses dan peningkatan mutu pendidikan akan membuat warga negara Indonesia memiliki kecakapan dan kompetensi dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya.

Pendidikan sangat erat kaitannya dengan kualitas sumber daya manusia di suatu wilayah. Semakin tinggi tingkat pendidikan, maka tingkat kesejahteraan penduduk diharapkan semakin baik. Dalam hal ini tentu penduduk dengan tingkat pendidikan setara SMP berpeluang memperoleh kesejahteraan yang lebih baik dibandingkan penduduk yang berpendidikan SD atau dibawahnya.

Dilihat menurut pendidikan tertinggi yang pernah di tamatkan, sebagian besar penduduk Kota Pariaman memiliki pendidikan setara SMA sederajat dan SMK dengan persentase mencapai 38,04 persen. Persentase penduduk yang menamatkan perguruan tinggi masih relatif kecil, yaitu sebesar 11,72 persen. Sementara itu, penduduk yang tidak memiliki ijazah sebesar 10,89 persen lebih rendah dibandingkan tahun 2017 sebesar 12,84 persen.

Penduduk dengan tingkat pendidikan setara SMP ke atas berpeluang memperoleh kesejahteraan yang lebih baik dibandingkan penduduk yang berpendidikan SD atau dibawahnya. Persentase penduduk dengan tingkat pendidikan minimal SMP di Kota Pariaman di tahun 2018 mencapai 72,30 persen.

Tabel 3.1 Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Penduduk Umur 15 Tahun Keatas (Persen) Kota Pariaman, 2017-2018

Tingkat Pendidikan	2017	2018
(1)	(2)	(3)
Tidak Mempunyai Ijazah	12,84	10,89
Tamat SD Sederajat	13,92	16,82
Tamat SMP Sederajat	22,00	20,21
Tamat SMA Sederajat	29,16	32,22
SMK	6,48	5,82
Dipoma I dan II	0,76	0,59
Diploma III	2,95	1,74
Diploma IV/S1/S2/S3	11,89	11,72
SMP ke atas	73,24	72,30

Sumber: BPS, Susenas 2017-2018

3.4 TINGKAT PARTISIPASI SEKOLAH

Salah satu tujuan dari SDGs adalah menjamin pemerataan pendidikan yang berkualitas dan meningkatkan kesempatan belajar untuk semua orang sampai dengan tahun 2030, baik laki-laki maupun perempuan. Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk menilai pencapaian SDGs adalah Angka Partisipasi Sekolah (APS) yaitu melihat akses pendidikan pada penduduk usia sekolah. Semakin tinggi APS semakin besar jumlah penduduk yang mempunyai kesempatan untuk mengenyam pendidikan.

Pada tahun 2018 masih terdapat sekitar 0,28 persen penduduk usia 7-12 tahun yang belum mengenyam pendidikan atau tidak bersekolah. Sedangkan pada kelompok usia 13- 15 tahun masih cukup besar bila dibandingkan dengan kelompok umur 7-12 tahun yaitu sebesar 2,58 persen penduduk yang sedang tidak bersekolah. Nilai APS usia 7-12 tahun dan usia 13-15 tahun yang kurang dari 100 menunjukkan bahwa penerapan program wajib belajar 9 tahun masih harus disempurnakan lagi. Karena hal ini bisa jadi mengindikasikan masih adanya kasus anak putus sekolah. Jika ditinjau berdasarkan jenis kelamin pada usia 7-12 tahun, Angka Partisipasi Sekolah anak laki-laki sudah mencapai angka 100, sedangkan perempuan sebesar 99,44 persen atau masih terdapat 0,56 persen anak perempuan yang tidak bersekolah. Sebaliknya pada kelompok usia 13-15 tahun, APS perempuan mencapai 100, sedangkan laki-laki sebesar 95,04 yang berarti terdapat sekitar 4,96 anak laki-laki usia 13-15 tahun yang tidak sekolah.

Tabel 3.2 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Usia Sekolah dan Jenis Kelamin di Kota Pariaman Tahun 2018

Jenis Kelamin	Kelompok Umur		
	7 – 12	13 – 15	16 – 18
(1)	(2)	(3)	(4)
Laki-laki	100,00	95,04	84,32
Perempuan	99,44	100,00	90,61
Laki-laki + perempuan	99,72	97,42	87,48

Sumber: BPS, Susenas 2018

Semakin tinggi kelompok umur, APS semakin rendah. Terlihat pada kelompok usia 16-18 tahun, APS hanya mencapai 87,48 persen atau terdapat 12,52 persen penduduk usia 16-18 tahun Kota

Pariaman Tahun 2018 yang tidak bersekolah. APS laki-laki di usia ini lebih rendah dibandingkan perempuan yaitu 84,32 persen berbanding 90,61 persen. Hal ini dapat mengindikasikan laki-laki usia 16-18 tahun lebih banyak putus sekolah dibandingkan perempuan.

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan persentase jumlah anak yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. Secara umum, semakin tinggi tingkat pendidikan, APM semakin menurun. Hal ini menunjukkan bahwa semakin menurunnya partisipasi penduduk dalam melanjutkan jenjang pendidikannya.

Tabel 3.3 Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan dan, Jenis Kelamin di Kota Pariaman Tahun 2018

Jenis Kelamin	Kelompok APM		
	SD	SMP	SMA
(1)	(2)	(3)	(4)
Laki-laki	100,00	69,96	51,05
Perempuan	99,44	68,72	75,84
Laki-laki + perempuan	99,72	69,36	63,48

Sumber:

BPS, Susenas 2018

Secara umum APM SD sudah mencapai 99,72 persen, yang artinya dari seluruh penduduk yang berusia 7-12 hanya satu orang yang tidak mengenyam bangku Sekolah Dasar. Seperti halnya APS, semakin tinggi jenjang pendidikan APM juga semakin menurun. APM tingkat SMP sebesar 69,36 persen, menunjukkan penduduk usia 13-15 tahun yang sedang bersekolah di jenjang SMP hanya sebesar 69,39 persen, dan APM tingkat SMA juga

semakin turun menjadi hanya sebesar 63,48 persen. Pada jenjang pendidikan SD dan SMP, APM Laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan, namun pada tingkat SMA APM perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki yaitu 75,84 persen berbanding 51,05 persen.

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur pemerataan dan perluasan akses pendidikan adalah Rasio Murid-Guru dan Rasio Murid-Kelas. Hal ini merupakan perbandingan antara jumlah murid dibandingkan dengan jumlah guru pada setiap jenjang pendidikan. Rasio Murid-Guru dapat memberikan gambaran besarnya beban guru dalam mengajar, sehingga apabila Rasio Murid-Guru semakin tinggi maka semakin banyak siswa yang harus dididik oleh seorang guru. Sedangkan Rasio Murid-Kelas menggambarkan daya tampung siswa dalam satu kelas. Semakin tinggi Rasio Murid-Kelas, maka semakin banyak jumlah siswa dalam satu kelas. Keadaan ini berdampak pada suasana dan keberhasilan dalam kegiatan proses belajar mengajar.

Tabel 3.4 Rasio Guru-Murid di Kota Pariaman Tahun 2014-2018

Tahun	Rasio Guru-Murid		
	SD	SMP	SMA
(1)	(2)	(3)	(4)
2018	12,88	12,23	12,27
2017	13,74	12,56	11,80
2016	14,08	12,70	10,68
2015	13,41	9,45	9,33
2014	14,71	9,87	11,87

Sumber: BPS, Pariaman dalam Angka, 2019

Selama kurun waktu 2014-2018 Rasio Murid-Guru SD menunjukkan angka cenderung menurun. Pada tahun 2014 rasio guru-murid sebesar 14 dan terus menunjukkan penurunan hingga di tahun

2018 rasio guru-murid Kota Pariaman mencapai 12 yang berarti rata-rata satu orang guru mengajar sebanyak 12 orang murid.

Namun sebaliknya pada jenjang pendidikan SMP dan SMA kecenderungan rasio guru-murid meningkat. Rasio Guru-murid SMP di tahun 2014 sebesar 9 dan di tahun 2018 menjadi 12, sedangkan rasio guru-murid SMA di tahun 2014 sebesar 11 menurun di tahun 2015 menjadi 9, namun kembali naik di tahun 2016 hingga di tahun 2018 menjadi sebesar 12. Meningkatnya rasio guru murid pada jenjang SMP dan SMA mengindikasikan bahwa jumlah murid semakin bertambah namun jumlah guru semakin berkurang.

Tabel 3.5 Rasio Murid-Kelas di Kota Pariaman Tahun 2014-2018

Tahun	Rasio Murid-Kelas		
	SD	SMP	SMA
(1)	(2)	(3)	(4)
2018	20,43	29,65	28,99
2017	21,19	30,32	28,84
2016	21,18	29,61	31,23
2015	20,71	29,06	27,25
2014	21,55	30,24	26,87

BPS, Pariaman dalam Angka, 2019

Indikator selanjutnya adalah Rasio Murid-Kelas yang menggambarkan daya tampung siswa dalam satu kelas. Rasio murid-kelas SD sebesar 20 artinya, rata-rata satu kelas SD di Kota Pariaman menampung sejumlah 20 siswa. Rasio Murid-kelas SMP sebesar 29 berarti rata-rata satu kelas SMP di Kota Pariaman menampung sebesar 29 siswa, sedang rasio murid-kelas SMA sebesar 28 menunjukkan satu kelas SMA menampung sebanyak 28 siswa. Jika dilihat antara tahun 2017 dan 2018, terlihat rasio kelas-murid SD dan SMP menurun menunjukkan adanya penambahan kelas atau jumlah murid yang

PENDJDIKAN

berkurang. Sedangkan rasio kelas-murid SMA yang cenderung tetap atau bahkan meningkat menunjukkan jumlah siswa SMA yang bertambah sedang jumlah kelas masih terbatas.

<https://pariamankota.bps.go.id>



Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Pariaman, Tahun 2017-2018

Tahun 2018 TPT perempuan jauh lebih tinggi dari pada TPT laki-laki yaitu 8,53 persen berbanding 3,46 persen

BAB IV KETENAGAKERJAAN

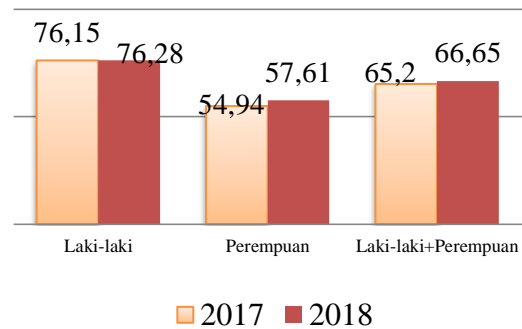
4. KETENAGAKERJAAN

Ketenagakerjaan merupakan salah satu aspek penting untuk menunjukkan kesejahteraan masyarakat, dengan indikator keberhasilan pembangunan ketenagakerjaan diantaranya adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). TPAK menggambarkan perbandingan jumlah penduduk 15 tahun ke atas yang termasuk ke dalam angkatan kerja dibandingkan jumlah penduduk 15 tahun ke atas. TPT menggambarkan perbandingan jumlah penduduk yang sedang mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha dan penduduk yang sudah mendapatkan pekerjaan tetapi belum mulai bekerja terhadap angkatan kerja. Sumber data yang digunakan adalah dari Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas).

4.1 TINGKAT PARTISIPASI ANGGKATAN KERJA (TPAK) DAN TINGKAT PENGANGGURAN (TPT)

TPAK Kota Pariaman tahun 2018 adalah 66,65 persen dan angka sedikit meningkat dibandingkan tahun 2017 (65,20 persen). Peningkatan TPAK ini merupakan indikasi meningkatnya kecenderungan penduduk ekonomi aktif untuk mencari atau melakukan kegiatan ekonomi. Jika dilihat menurut jenis kelamin, TPAK laki-laki jauh lebih tinggi dari TPAK perempuan yaitu 76,28 persen berbanding 57,61 persen. Namun jika dilihat antar tahun terlihat TPAK perempuan meningkat dibandingkan tahun 2017 yang hanya sebesar 54,94 persen. Sedangkan TPAK laki-laki justru sedikit menurun dari 76,15 persen di tahun 2017 menjadi 76,28 di tahun 2018.

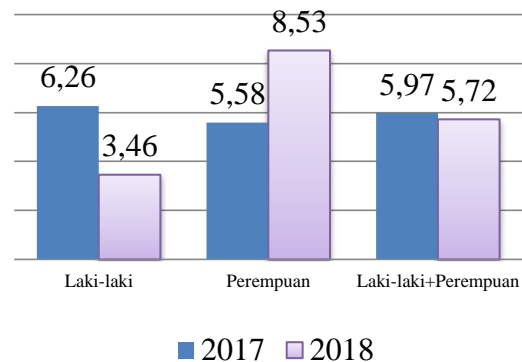
Gambar 4.1 Tingkat Parsipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin Kota Pariaman, Tahun 2017-2018



Sumber: BPS, Sakernas 2017 - 2018

TPT Kota Pariaman turun dari 5,97 persen pada tahun 2017 menjadi 5,72 persen tahun 2018. Hal ini mengindikasikan kondisi ekonomi secara makro cukup dapat menyerap tenaga kerja lebih baik. Tahun 2018 TPT perempuan jauh lebih tinggi dari pada TPT laki-laki yaitu 8,53 persen berbanding 3,46 persen.

Gambar 4.2 Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Jenis Kelamin Kota Pariaman, Tahun 2017-2018



Sumber: BPS, Sakernas 2017 - 2018

4.2 TINGKAT PENGANGGURAN DAN TINGKAT PENDIDIKAN

TPT menurut tingkat pendidikan disajikan pada Tabel 4.1. Dari tabel tersebut diketahui bahwa TPT cenderung tinggi untuk mereka yang mempunyai pendidikan tinggi. Hal tersebut menunjukkan bahwa penduduk dengan tingkat pendidikan yang

lebih tinggi lebih sulit mendapatkan pekerjaan dibandingkan penyerapan tenaga kerja dengan pendidikan yang lebih rendah. Semakin tinggi pendidikan, maka semakin sempit lapangan pekerjaan, karena jenis pekerjaan untuk pendidikan lebih tinggi, lebih spesifik dan lebih membutuhkan keahlian tertentu, sehingga tidak membutuhkan pekerja dalam jumlah besar. Berbeda dengan jenis pekerjaan untuk angkatan kerja yang berpendidikan rendah, yang tidak terlalu membutuhkan keterampilan khusus.

Tabel 4.1 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Jenis Kelamin di Kota Pariaman Tahun 2018

Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Tidak Punya Ijazah SD	5,05	1,23	3,52
SD/MI	-	8,47	2,64
SMP/Tsanawiyah	3,56	12,35	7,51
SMA Umum	6,62	9,08	7,67
SM Kejuruan	1,31	16,00	6,45
Diploma/Akademi	-	-	-
Universitas/S1/S2/S3	1,60	6,01	4,31
Total	3,46	8,53	5,72

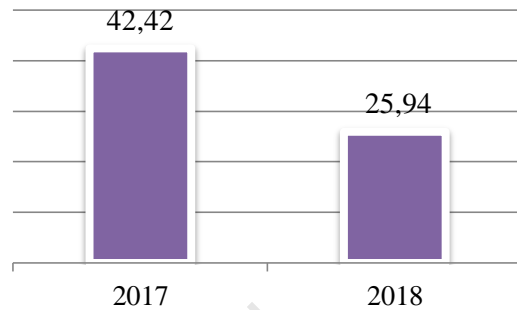
Sumber: BPS, Sakernas 2018

Melihat rendahnya TPT di kategori tingkat pendidikan dasar/rendah (SD ke bawah), maka dapat dikatakan bahwa sebagian besar penganggur di Kota Pariaman merupakan pengangguran terdidik.

Apabila dilihat dari Gambar 4.3, TPT dengan pendidikan minimal SMP di tahun 2018 lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2017 yaitu 25,94 persen berbanding 42,42 persen. Hal ini bisa menunjukkan adanya peningkatan penyerapan tenaga kerja untuk pendidikan

minimal SMP di Kota Pariaman tahun 2018.

Gambar 4.3 Tingkat Pengangguran Terbuka dengan Pendidikan Minimal SMP di Kota Pariaman, Tahun 2017-2018



Sumber: BPS, Sakernas 2017 – 2018

4.3 LAPANGAN USAHA DAN STATUS PEKERJAAN

Persentase pekerja di Kota Pariaman masih didominasi oleh kontribusi sektor pertanian yaitu sebesar 35,17 persen tahun 2017 dan 36,44 persen pada tahun 2016. Jika dibedakan menurut daerah tempat tinggal, daerah perdesaan paling besar menyerap tenaga kerja sektor pertanian yaitu sebesar 49,19 persen tahun 2016 dan 50,79 persen di tahun 2017.

Tabel 4.2 Persentase Pekerja Menurut Lapangan Usaha di Kota Pariaman Tahun 2017-2018

Lapangan Pekerjaan Utama	2017	2018
(1)	(2)	(3)
Pertanian	10,40	9,98
Industri	11,57	11,28
Perdagangan	32,73	34,23
Jasa	29,29	28,62
Lainnya	16,01	15,89

Sumber: BPS, Sakernas 2017-2018

Catatan:

- Pertanian termasuk kehutanan, perburuan, peternakan dan perikanan

- Perdagangan meliputi perdagangan besar, eceran, rumah makan, hotel
- Jasa meliputi jasa kemasyarakatan, sosial dan
- perorangan
- Lainnya termasuk pertambangan, penggalian,
- listrik, gas dan air, bangunan, angkutan, pergudangan, komunikasi, keuangan, asuransi, usaha persewaan bangunan, tanah dan jasa perusahaan

Selama tahun 2017-2018 lapangan pekerjaan utama di Kota Pariaman adalah bidang perdagangan, yaitu berturut-turut sebesar 32,73 persen dan 34,23 persen. Disamping perdagangan, sektor jasa juga mendominasi. Pada tahun 2017 penduduk yang bekerja di sektor jasa sebesar 29,29 persen dan menurun persentasenya menjadi 28,62 persen tahun 2018. Dari tabel 3.4 terlihat sektor pertanian juga mengalami penurunan dari 10,40 persen di tahun 2017 menjadi 9,98 persen di tahun 2018.

Tabel 4.3 Persentase Penduduk Bekerja Menurut Status Pada Lapangan Usaha Utama di Kota Pariaman Tahun 2017-2018

Lapangan Pekerjaan Utama	2017	2018
(1)	(2)	(3)
Berusaha sendiri	20,30	17,48
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar	12,59	12,77
Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar	4,18	3,48
Buruh/karyawan/pegawai	46,92	49,79
Pekerja bebas di pertanian	2,15	1,47
Pekerja bebas di non pertanian	4,47	4,77
Pekerja tidak dibayar	9,40	10,23

Sumber: BPS, Sakernas 2017-2018

Bila dilihat menurut status pekerjaan, mayoritas pekerja adalah buruh/karyawan/pegawai yang mencapai

49,79 persen di tahun 2018 meningkat dibandingkan tahun 2017 (46,92 persen). Status bekerja berusaha sendiri juga cukup besar di kota Pariaman yaitu sebesar 17,48 persen di tahun 2018. Sedangkan status pekerjaan terkecil adalah pekerja bebas di pertanian yang hanya sebesar 1,47 persen melihat persentase pekerja pada lapangan usaha ini hanya sebesar 9,98 persen.

4.4 JAM KERJA

Fokus ketenagakerjaan tidak hanya pada besarnya angka pengangguran tetapi juga pada produktivitas tenaga kerja melalui jumlah jam kerja. Asumsi yang berlaku adalah semakin banyak jam kerja maka pekerja akan semakin produktif. Konsep jumlah jam kerja yang digunakan adalah lama waktu (dalam jam) yang digunakan untuk bekerja dari seluruh pekerjaan yang dilakukan (tidak termasuk jam istirahat dan jam kerja yang digunakan untuk hal-hal di luar pekerjaan) selama seminggu yang lalu. Bila pekerja bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu) dan masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan disebut Setengah Pengangguran.

Tabel 4.4 Persentase Penduduk Bekerja Menurut Jam Kerja di Kota Pariaman Tahun 2017-2018

Kelompok Jam Kerja	2017	2018
(1)	(2)	(3)
0*	5,90	4,67
1-9	2,62	6,19
10-24	13,67	12,82
25-34	10,96	5,90
35-44	22,07	25,00
45-59	24,48	30,62
60+	20,30	14,80
Jumlah	100,00	100,00

Sumber: BPS, Sakernas 2017-2018

KETENAGAKERJAAN

Pada Tabel 4.4 terlihat penduduk yang bekerja kurang dari jam kerja normal mengalami penurunan. Penduduk yang bekerja kurang dari jam kerja normal pada tahun 2017 sebesar 27,24 persen turun menjadi 24,91 persen di tahun 2018. Sementara itu, penduduk yang bekerja di atas 60 jam adalah 20,30 persen tahun 2017, juga menurun menjadi 14,80 persen pada tahun 2018. Hal ini menyebabkan peningkatan persentase penduduk yang bekerja selama 35-59 jam meningkat dari 46,55 persen di tahun 2017 menjadi 55,62 persen di tahun 2018.

Dengan melihat jam kerja dapat diperoleh Tingkat Setengah Pengangguran (TSP). TSP dihitung dengan cara membandingkan antara jumlah penduduk yang bekerja di bawah jam kerja normal dengan jumlah angkatan kerja. Tingginya TSP mengindikasikan bahwa kurang optimalnya pemanfaatan tenaga kerja yang ada. Dari Tabel 4.4, TSP Kota Pariaman pada tahun 2017 adalah 27,25 persen dan tahun 2018 menurun menjadi 23,48 persen.

tahun 2018. Kecuali, untuk kelompok umur 25-34 tahun yang meningkat dari 14,69 persen di tahun 2017 menjadi 18,58 persen di tahun 2018. Penurunan di kelompok umur 15-19 tahun cukup signifikan yaitu turun sebesar 14,09 persen, sedangkan pada kelompok umur 34-44 tahun penurunannya tidak terlalu signifikan.

Tabel 4.5 Tingkat Setengah Penganggur di Kota Pariaman Tahun 2017-2018

Kelompok Umur	2017	2018
(1)	(2)	(3)
15-19	59,29	45,20
20-24	22,73	13,95
25-34	14,69	18,58
35-44	24,50	23,54
45-54	33,75	26,43
55-64	27,41	17,27
65+	54,15	44,14
TPT	27,25	23,48

Sumber: BPS, Sakernas 2017-2018

Secara umum, hampir di semua kelompok umur mengalami penurunan di



Persentase Pengeluaran Perkapita Sebulan Menurut Jenis Pengeluaran di Kota Pariaman, Tahun 2017 dan 2018

Persentase pengeluaran makanan lebih tinggi dibandingkan non makanan mengindikasikan pengeluaran makanan masih menjadi prioritas masyarakat Kota Pariaman

BAB V TARAF DAN POLA KONSUMSI

5. TARAF DAN POLA KONSUMSI

Pola konsumsi masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti ketersediaan pangan, budaya, tingkat pendapatan maupun lingkungan tempat tinggal. Ada pendapat yang mengelompokkan faktor yang menentukan konsumsi sebagai faktor ekonomi demografi dan non ekonomi. Pendapatan dan aset masuk dalam kelompok ekonomi yang akan menentukan daya beli masyarakat. Selanjutnya jenis kelamin, umur dan struktur rumah tangga merupakan variabel demografi yang dapat mempengaruhi pola konsumsi penduduk. Kondisi sosial budaya menentukan pola konsumsi penduduk melalui kecenderungan (selera) penduduk dalam kebutuhan makan maupun non makanan. Pengaruh tersebut melalui tata nilai yang hidup dalam budaya setempat yang disebut sebagai faktor non ekonomi.

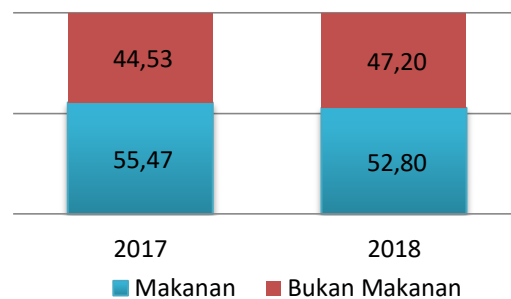
5.1 PENGELUARAN RUMAH TANGGA

Ernst Engel seorang statistisi dari Jerman mengatakan bahwa persentase pendapatan yang dialokasikan untuk konsumsi makanan akan menurun seiring dengan peningkatan pendapatan. Elastisitas pendapatan terhadap permintaan makanan rendah (antara 0 dan 1), sebaliknya elastisitas untuk permintaan terhadap komoditas non makanan tinggi. Kecenderungan proporsi konsumsi makanan dan non makanan tersebut sering digunakan sebagai salah satu indikator untuk mengilustrasikan kesejahteraan penduduk.

Tabel 5.1 memperlihatkan bahwa pengeluaran rata-rata per kapita sebulan tahun 2017 dan 2018 untuk makanan dan bukan makanan penduduk meningkat Rp. 1.218.958,- menjadi Rp. 1.280.498,-. Persentase pengeluaran untuk makanan memperlihatkan adanya penurunan yaitu dari 55,47 persen menjadi 52,80 persen, dan sebaliknya persentase untuk pengeluaran bukan makanan meningkat dari 44,53 persen menjadi 47,20 persen.

Persentase pengeluaran makanan lebih tinggi dibandingkan non makanan mengindikasikan pengeluaran makanan masih menjadi prioritas masyarakat Kota Pariaman. Namun terjadinya penurunan pengeluaran makanan dan peningkatan pengeluaran non makanan dapat menunjukkan bahwa kesejahteraan penduduk Kota Pariaman sedikit meningkat. Pergeseran pola pengeluaran penduduk dapat dilihat pada Gambar 5.1

Gambar 5.1 Persentase Pengeluaran Perkapita Sebulan Menurut Jenis Pengeluaran di Kota Pariaman, Tahun 2017 dan 2018



Sumber: BPS, Susenas 2017-2018

Tabel 5.1 menunjukkan struktur pengeluaran penduduk Kota Pariaman berdasarkan kelompok komoditas makanan dan non makanan. Pada tahun 2018 terjadi pergeseran struktur antara sub komponen pengeluaran tersebut. Pengeluaran rumah tangga untuk komoditas perumahan serta aneka barang dan jasa berkontribusi paling

tinggi terhadap total pengeluaran non makanan yaitu masing-masing sebesar 18,06 persen dan 11,40 persen. Jika dilihat dari pertumbuhannya maka kelompok barang dan jasa memiliki pertumbuhan yang paling tinggi yaitu sebesar 129,23 persen. Pengeluaran barang tahan lama juga mengalami peningkatan yang cukup besar yaitu meningkat sebesar 78,02 persen di tahun 2018. Komoditas yang mengalami penurunan dari tahun sebelumnya adalah keperluan rumah tangga lainnya yang meliputi pajak pungutan dan asuransi serta keperluan pesta dan upacara/kenduri yaitu turun sebesar 62,04 persen.

Tabel 5.1 Pengeluaran Rata-rata Perkapita Sebulan Menurut Barang di Kota Pariaman, 2017-2018

Jenis Pengeluaran	2017		2018		Persentase Perubahan (%)
	Nominal (Rp)	Proporsi	Nominal (Rp)	Proporsi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Makanan	676.192	55,47	676.113	52,80	-0,01
Bukan Makanan	542.766	44,53	604.385	47,20	11,35
Perumahan	212.231	17,41	231.268	18,06	8,97
Barang dan Jasa	63.707	5,23	146.034	11,40	129,23
Pakaian	51.420	4,22	55.589	4,34	8,11
Barang Tahan Lama	64.067	5,26	114.051	8,91	78,02
Lainnya	151.341	12,42	57.443	4,49	-62,04
Jumlah	1.218.958	100,00	1.280.498	100,00	5,05

Sumber: BPS, Susenas 2017-2018

Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan untuk kelompok makanan dan non makanan meningkat sebesar 5,05 persen di tahun 2018. Jika dilihat rinciannya, rata-rata pengeluaran per kapita sebulan untuk kelompok makanan penduduk Kota Pariaman pada tahun 2017 adalah Rp. 676.113,-. Jumlah ini tidak jauh berbeda dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan rata-rata pengeluaran non

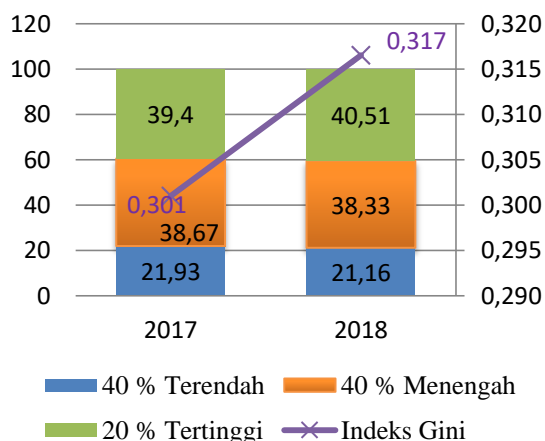
makanan per kapita sebulan penduduk Kota Pariaman pada tahun 2018 adalah Rp. 604.385,-, meningkat 11,35 persen dari tahun sebelumnya. Jika dilihat dari strukturnya, proporsi pengeluaran untuk kelompok makanan mengalami penurunan sedangkan proporsi pengeluaran non makanan meningkat.

5.2 DISTRIBUSI PENDAPATAN

Salah satu ukuran ketimpangan yang sangat populer dan banyak digunakan adalah Indeks Gini. Koefisien Indeks Gini dihitung berdasarkan Kurva *Lorenz*, yaitu kurva yang menghubungkan frekuensi kumulatif distribusi pendapatan atau pengeluaran dengan distribusi seragam (*uniform*) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Nilai dari Indeks Gini mempunyai rentang dari 0 sampai 1. Jika terjadi pemerataan yang sempurna Indeks Gini akan bernilai 0. Sebaliknya akan terjadi ketimpangan sempurna apabila Indeks Gini bernilai 1.

Kemudian Bank Dunia juga membuat kriteria distribusi pendapatan untuk menggambarkan ketimpangan. Pada kriteria Bank Dunia penduduk digolongkan menjadi tiga kelas, yaitu 40 persen penduduk berpendapatan rendah, 40 persen penduduk berpendapatan sedang dan 20 persen penduduk berpendapatan tinggi. Penghitungan Indeks Gini dan kriteria Bank Dunia pada ulasan ini menggunakan data pengeluaran. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa data pengeluaran lebih teliti daripada data pendapatan dan data pengeluaran dapat digunakan sebagai pendekatan (*proxy*) dari pendapatan.

Gambar 5.2 Distribusi Pengeluaran Penduduk dan Indeks Gini di Kota Pariaman Tahun 2017-2018



Sumber: BPS, Susenas 2017-2018

Dari gambar 5.2 dapat diketahui bahwa di Kota Pariaman pada tahun 2018 terjadi kenaikan indeks gini. Artinya ketimpangan pendapatan yang ada di Kota Pariaman meningkat. Jika dilihat lebih dalam terjadi peningkatan pengeluaran pada penduduk berpendapatan tinggi namun tidak terdapat peningkatan pengeluaran pada kelompok penduduk berpendapatan rendah dan menengah seperti yang ditunjukkan Tabel 5.2.

Tabel. 5.2 Distribusi Pengeluaran Penduduk Perkapita dan Indeks Gini di Kota Pariaman, 2016-2018

Golongan Pengeluaran	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)
40 % Terendah	20,68	21,93	21,16
40 % Menengah	35,98	38,67	38,33
20 % Tertinggi	43,33	39,4	40,51
Indeks Gini	0,338	0,301	0,317

Sumber: BPS, Susenas 2016-2018

Pada tahun 2018, 40 persen penduduk yang mengeluarkan rendah menerima 21,16 persen dari seluruh pendapatan. Berdasarkan indikator ketimpangan Bank Dunia, angka tersebut

masih dalam tingkat ketimpangan yang rendah karena kelompok tersebut menerima lebih dari 17 persen dari seluruh pendapatan.

Diluar dari penjelasan di atas jika dilihat dalam 3 tahun terakhir terlihat bahwa penduduk yang termasuk 40 persen mengeluarkan rendah mengalami peningkatan, yaitu dari 20,68 persen di tahun 2016 menjadi 21,16 di tahun 2018. Kelompok penduduk dengan 40 persen mengeluarkan sedang juga mengalami peningkatan, yaitu dari 35,98 persen tahun 2016 menjadi 38,33 persen pada tahun 2018.

Sebaliknya penurunan persentase pengeluaran terjadi pada kelompok 20 persen mengeluarkan tinggi, yaitu dari 43,33 persen di tahun 2016 menjadi 40,51 persen pada tahun 2018. Dengan peningkatan persentase penduduk di kelompok 40 persen pengeluaran rendah dan sedang serta penurunan persentase penduduk di kelompok 20 persen pengeluaran tinggi menggambarkan bahwa distribusi pengeluaran penduduk tahun 2018 secara umum cenderung membaik dibanding tahun 2016. Hal ini sejalan dengan turunnya Indeks Gini dari tahun 2016 sebesar 0,338 menjadi 0,317 di tahun 2018.

5.3 KONSUMSI ENERGI DAN PROTEIN

Tingkat kecukupan gizi yang mencakup konsumsi kalori dan protein merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk. Jumlah konsumsi kalori dan protein dihitung berdasarkan jumlah dari hasil kali antara kuantitas setiap makanan yang dikonsumsi dengan besarnya kandungan kalori dan protein dalam setiap

makanan tersebut. Angka Kecukupan Gizi (AKG) yang dianjurkan adalah suatu kecukupan rata-rata zat gizi setiap hari bagi semua orang menurut golongan umur, jenis kelamin, ukuran tubuh, aktivitas tubuh untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 75 Tahun 2013 (Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi XI tahun 2012), rata-rata kecukupan energi dan protein bagi penduduk Indonesia masing-masing sebesar 2150 kkal dan 57 gram protein.

Tabel 5.2 Konsumsi Energi dan Protein per Kapita per Hari Kota Pariaman, 2016-2018

Konsumsi	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)
Energi (kkal)	2.068,68	2.102,82	2.057,86
Protein (gram)	58,48	61,44	63,05

Sumber: BPS, Susenas 2016-2018

Rata-rata konsumsi kalori penduduk pada tahun 2018 sebesar 2.057,86 kkal atau turun sebesar 44,96 kkal dibanding tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 2.102,82 kkal. Sebaliknya, rata-rata konsumsi protein per kapita mengalami peningkatan dari 61,44 gram pada tahun 2017 menjadi 63,05 gram pada tahun 2018. Jika dilihat dari tahun 2016 hingga 2018, konsumsi kalori per hari penduduk belum mencapai syarat kecukupan gizi berdasarkan Widya Karya Pangan dan Gizi sebesar 2.150 kkal namun konsumsi protein per kapita sudah menacapai ketentuan atau batas kecukupan gizi yang direkomendasikan yaitu sebesar 57 gram.

Jika dilihat konsumsi per komoditasnya, terdapat 3 kelompok makanan dengan kontribusi terbesar terhadap konsumsi kalori penduduk yaitu

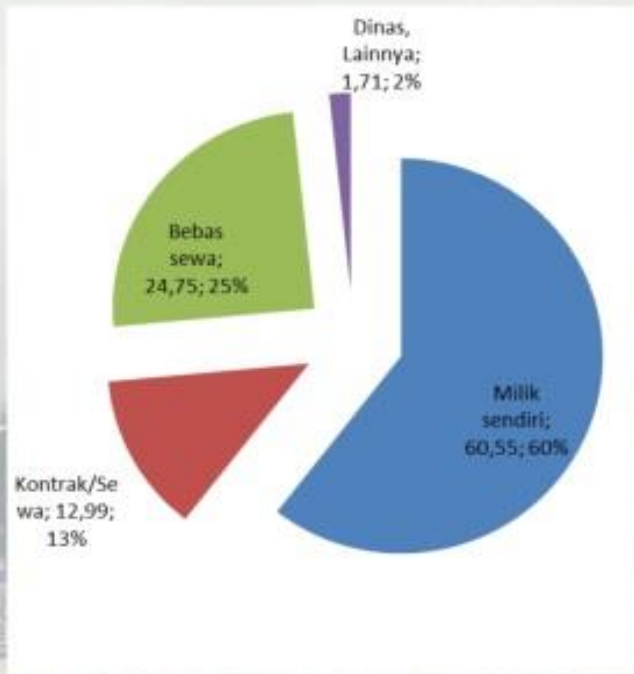
kelompok padi-padian , makanan/minuman jadi dan minyak dan kelapa masing-masing sebesar 623,65 kkal, 789,32 kkal dan 277,08 kkal. Sedangkan komoditi dengan kontribusi paling rendah adalah kelompok bumbu-bumbuan yang hanya sebesar 3,83 kkal.

Tabel 5.3 Jumlah Konsumsi Kalori dan Konsumsi Protein per Jenis Komoditi di Kota Pariaman, 2018

Kelompok Komoditi	Konsumsi Kalori (kkal/kapita a/hari)	Konsumsi Protein (gr/kapita/hari)
(1)	(2)	(3)
Padi-Padian	623,65	14,62
Umbi-Umbian	14,91	0,24
Ikan	45,28	7,73
Daging	50,25	3,11
Telur Dan Susu	64,91	3,71
Sayur-Sayuran	27,88	1,51
Kacang-Kacangan	27,43	3,07
Buah-Buahan	49,08	0,55
Minyak Dan Kelapa	277,08	0,53
Bahan Minuman	58,48	0,40
Bumbu-Bumbuan	3,83	0,12
Bahan Makanan Lainnya	25,78	0,49
Makanan Minuman Jadi	789,32	26,97
Rokok Dan Tembakau	-	-
Total Makanan	2.057,86	63,05

Sumber: BPS, Susenas 2018

Sama halnya dengan konsumsi kalori, komoditi penyumbang terbesar terhadap konsumsi protein penduduk Kota Pariaman adalah kelompok padi-padian dan makanan/minuman jadi masing-masing sebesar 14,2 gram dan 26,97 gram. Kelompok ikan juga memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap konsumsi protein yaitu sebesar 7,73 gram.



Persentase Rumah Tangga Menurut Status kepemilikan di Kota Pariaman Tahun 2017

Rumah dengan status milik sendiri merupakan status kepemilikan paling besar proporsinya di Kota Pariaman yaitu 60,55 persen

BAB VI PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN

6. PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN

Berdasarkan UU No 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Perumahan didefinisikan sebagai kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan fasilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. Kualitas perumahan akan dipengaruhi oleh kualitas rumah penduduk beserta kawasan permukiman.

6.1 KUALITAS RUMAH TINGGAL

Penilaian kualitas rumah sering dikaitkan dengan konsep rumah sehat. Rumah sehat diartikan secara luas karena konsep sehat itu sendiri mencakup suatu keadaan yang sempurna baik fisik, mental, maupun sosial budaya, bukan hanya keadaan yang bebas dari penyakit dan kelemahan (kecacatan).

Kementrian Kesehatan mensyaratkan ada empat kondisi yang dipenuhi sehingga rumah dapat dikategorikan sebagai rumah sehat, yaitu:

1. Memenuhi kebutuhan psikologis, antara lain privasi yang cukup, komunikasi yang sehat antar anggota keluarga dan penghuni rumah, adanya ruangan khusus untuk istirahat (ruang tidur), bagi masing-masing penghuni;
2. Memenuhi persyaratan pencegahan penularan penyakit antar penghuni rumah dengan penyediaan air bersih, pengelolaan tinja dan limbah rumah tangga, bebas vektor penyakit dan tikus, kepadatan hunian yang tidak berlebihan, cukup

sinar matahari pagi, terlindungnya makanan dan minuman dari pencemaran, disamping pencahayaan dan penghawaan yang cukup;

3. Memenuhi persyaratan pencegahan terjadinya kecelakaan baik yang timbul karena pengaruh luar dan dalam rumah, antara lain persyaratan garis sempadan jalan, konstruksi bangunan rumah, bahaya kebakaran dan kecelakaan di dalam rumah;
4. Memenuhi kebutuhan fisiologis antara lain pencahayaan, penghawaan dan ruang gerak yang cukup, terhindar dari kebisingan yang mengganggu.

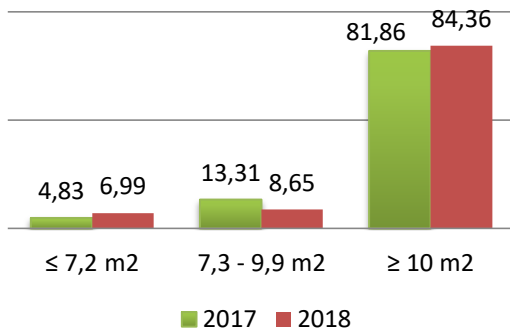
Selanjutnya terdapat beberapa indikator untuk penilaian rumah sehat yaitu komponen rumah tinggal, sanitasi dan perilaku penghuni. Komponen rumah tinggal terdiri dari langit-langit, dinding, ventilasi/jendela, lantai, kepadatan, pencahayaan serta pemanfaatan pekarangan. Aspek sanitasi mencakup sumber air bersih, jamban, sarana pembuangan limbah dan sampah. Kemudian keberadaan jentik nyamuk, vektor tikus serta kebiasaan cuci tangan merupakan variabel yang digunakan untuk menilai perilaku sehat penghuni rumah.

Tabel 6.1 menunjukkan di Kota Pariaman didominasi oleh rumah tangga dengan luas lantai perkapita lebih dari 10 m² yaitu sebesar 84,36 persen. Nilai ini meningkat dibanding tahun sebelumnya yang sebesar 81,86 persen. Rumah tangga dengan luas lantai 7,3 hingga 9,9 m² menurun dari 13,31 persen di tahun 2017 menjadi 8,65 persen di tahun 2018. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi penambahan luas lantai rumah di Kota Pariaman. Masih ditemukan rumah tangga dengan luas lantai

PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN

perkapita kurang dari 7,2 m² di Kota Pariaman yaitu sebesar 6,99 persen.

Gambar 6.1 Persentase Rumah Tangga Menurut Luas Lantai perkapita (m²) di Kota Pariaman, 2017-2018



Sumber: BPS, Susenas 2017-2018

Terjadi beberapa pergeseran perubahan kualitas rumah dan tempat tinggal di Kota Pariaman. Luas lantai bukan tanah di Kota Pariaman tahun 2018 sudah mencapai 100 persen, begitu juga dengan dinding terluas bukan bambu/kayu/anyaman bambu. Namun terjadi penurunan persentase rumah tangga dengan atap terluas bukan jerami/ijuk turun dari 100 persen di tahun 2017 menjadi 99,55 persen di tahun 2018.

Tabel 6.1 Rumah Tangga Menurut Beberapa Indikator Kualitas Rumah dan Tempat Tinggal di Kota Pariaman Tahun 2017 dan 2018

Indikator Perumahan	2017	2018
(1)	(2)	(3)
Lantai terluas bukan tanah (%)	99,53	100,00
Atap terluas bukan jerami/ijuk/daun/rumbia atau lainnya (%)	100,00	99,55
Dinding terluas bukan bambu/anyaman bambu atau lainnya (%)	99,35	100,00
Rata-rata luas lantai per kapita (m ²)	20,46	20,80

Sumber: BPS, Susenas 2017-2018

Rata-rata luas lantai per kapita di Kota Pariaman tidak mengalami perubahan yang signifikan dari tahun 2017 ke 2018. Rata-rata luas lantai per kapita kota Pariaman berkisar 20 m². Namun angka ini sangat tinggi dibandingkan minimal luas lantai per kapita baik menurut Kementerian Kesehatan maupun Kementerian Perumahan Rakyat yang menyebutkan minimal lantai per kapita untuk hidup sehat adalah 8 meter persegi dan 7,2 meter persegi.

6.2 FASILITAS RUMAH TINGGAL

Persentase rumah tangga yang sudah menggunakan fasilitas air kemasan, air isi ulang & ledeng untuk air minum di Kota Pariaman sebesar 55,84 persen di tahun 2018. Persentase ini sedikit menurun dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 56,37 persen di tahun 2017. Sehubungan dengan hal tersebut persentase rumah tangga yang sudah mengakses air minum bersih juga mengalami penurunan dari 81,00 persen di tahun 2017 menjadi di tahun 78,41 persen 2018.

Tabel 6.2 Persentase Rumah Tangga Menurut Beberapa Fasilitas Perumahan dan Daerah Tempat Tinggal di Kota Pariaman Tahun 2017 dan 2018

Fasilitas Perumahan	2017	2018
(1)	(2)	(3)
Air kemasan, air isi ulang dan ledeng	56,37	55,84
Air minum bersih	81,00	78,41
Jamban sendiri	85,53	86,69
Jamban sendiri dengan tangki septik	78,22	81,57
Sumber penerangan listrik	98,78	99,76

Sumber: BPS, Susenas 2017-2018

Persentase rumah tangga yang memiliki jamban sendiri, pembuangan akhir tinja dengan tangki, serta memiliki sumber penerangan listrik mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.

6.3 STATUS KEPEMILIKAN RUMAH

Status kepemilikan rumah tinggal merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kesejahteraan dan juga peningkatan taraf hidup masyarakat. Kondisi ekonomi rumah tangga sangat berpengaruh terhadap kepemilikan rumah tinggal. Status kepemilikan rumah tinggal yang dicakup di sini adalah rumah milik sendiri, kontrak, sewa, bebas sewa, rumah dinas, rumah milik orang tua/saudara atau status rumah kepemilikan lainnya. Rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri dapat dikatakan telah mampu memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal yang terjamin dan permanen dalam jangka panjang.

Tabel 6.3 Persentase Rumah Tangga.

Menurut Status Kepemilikan dan Daerah Tempat Tinggal Di Kota Pariaman Tahun 2017 dan 2018

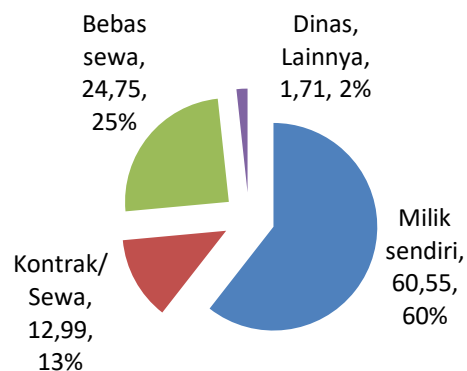
Status Kepemilikan Rumah	2017	2018
(1)	(2)	(3)
Milik sendiri	58,89	60,55
Kontrak/Sewa	17,12	12,99
Bebas sewa	21,57	24,75
Dinas, Lainnya	2,42	1,71

Sumber: BPS, Susenas 2017-2018

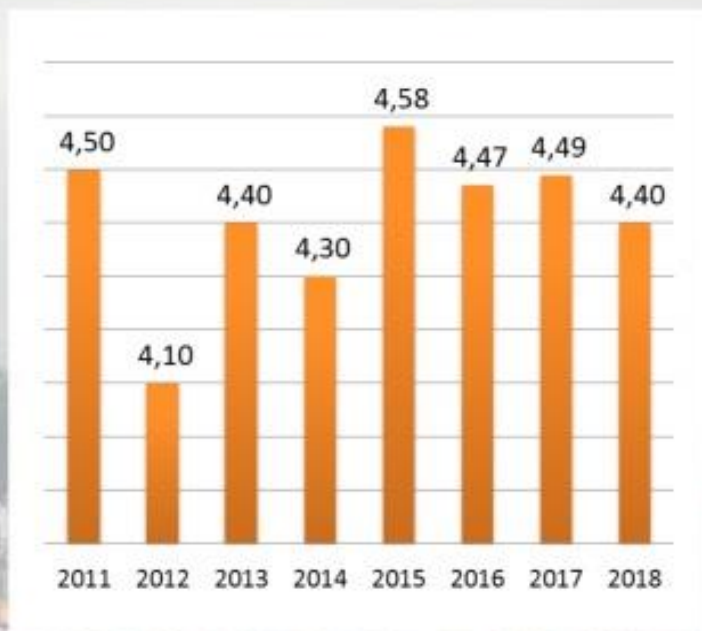
Rumah dengan status milik sendiri merupakan status kepemilikan paling besar proporsinya di Kota Pariaman. Pada tahun 2017 rumah tangga yang memiliki rumah sendiri sebesar 58,89 persen dan meningkat

menjadi 60,55 persen di tahun 2018. Hal ini dapat disebabkan meningkatnya rumah tangga di Pariaman yang membeli/memiliki rumah sendiri, beralih dari status mengontrak, terlihat dari persentase rumah tangga yang mengontrak di Kota Pariaman turun dari 17,12 persen menjadi 12,99 persen. Begitu juga, rumah dengan status kepemilikan dinas atau lainnya juga semakin turun dari 2,42 persen menjadi 1,71 persen di tahun 2018. Rumah dengan status bebas sewa merupakan status kepemilikan nomor dua terbesar yang juga meningkat proporsinya dari 21,57 persen di tahun 2017 menjadi 24,75 persen di tahun 2018.

Gambar 6.2 Persentase Rumah Tangga Menurut Status kepemilikan di Kota Pariaman Tahun 2018



Sumber: BPS, Susenas 2018



Jumlah Penduduk Miskin Kota Pariaman (ribu), Tahun 2011-2018

Secara absolut jumlah penduduk miskin pada periode 2011-2018 berkisar di angka empat ribuan.

BAB VII KEMISKINAN

7. KEMISKINAN

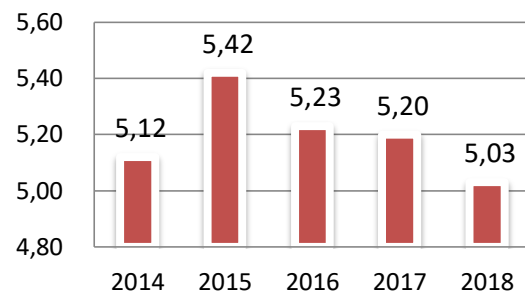
Kemiskinan merupakan suatu masalah multidimensional. Kemiskinan tidak hanya diartikan dari pendapatan yang diperoleh sedikit, namun juga berhubungan dengan aspek sosial, ekonomi, budaya dan aspek lainnya. Kompleksnya masalah kemiskinan menjadikannya sebagai masalah yang dialami oleh banyak negara, tidak hanya Indonesia. Upaya untuk mengentaskan kemiskinan sudah lama dilakukan oleh pemerintah sejak masa awal kemerdekaan. Penanggulangan kemiskinan secara sinergis dan sistematis harus dilakukan agar seluruh warga negara mampu menikmati kehidupan yang layak dan bermartabat.

Salah satu aspek penting untuk mendukung penanggulangan kemiskinan ini adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat. Data kemiskinan yang baik dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan, menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi hidup mereka. Data kemiskinan yang dihitung BPS berasal dari SUSENAS yang dilakukan oleh BPS setiap tahunnya.

7.1 JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MISKIN

Konsep atau pendekatan yang digunakan BPS tentang kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

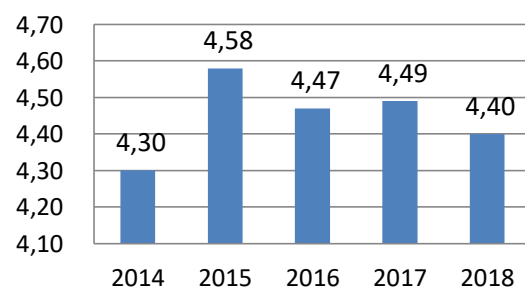
Gambar 7.1 Persentase Penduduk Miskin Kota Pariaman, Tahun 2014-2018



Sumber: BPS, Susenas 2014-2018 (kondisi Maret)

Perkembangan persentase kemiskinan di Kota Pariaman periode tahun 2014-2018 ditunjukkan pada gambar 7.1. Sejak tahun 2014, persentase penduduk miskin di Kota Pariaman berfluktuatif walaupun menunjukkan kecenderungan menurun. Tahun 2014 persentase penduduk miskin di Kota Pariaman sebesar 5,12 persen dan meningkat menjadi 5,42 di tahun 2015. Tahun 2015 merupakan persentase kemiskinan tertinggi dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Tahun-tahun berikutnya angka kemiskinan semakin menurun, dan pada tahun 2018 mencapai nilai terendah sebesar 5,03 persen.

Gambar 7.1 Jumlah Penduduk Miskin Kota Pariaman (ribu), Tahun 2014-2018



Sumber: BPS, Susenas 2014-2018 (kondisi Maret)

Secara absolut jumlah penduduk miskin pada periode 2014-2018 berkisar di angka empat ribuan. Jumlah penduduk

miskin di tahun 2014 sebanyak 4,30 ribu jiwa kemudian bertambah menjadi 4,58 ribu jiwa di tahun 2015. Tahun 2013 kembali turun menjadi 4,47 ribu jiwa hingga di tahun 2018 jumlah penduduk miskin turn menjadi sekitar 4,4 ribu jiwa.

Tabel 7.1 Perkembangan Penduduk Miskin di Kota Pariaman, 2011-2018

Tahun	Jumlah penduduk miskin (Ribu)	Persentase penduduk miskin (%)
(1)	(2)	(3)
2011	4,50	5,66
2012	4,10	5,02
2013	4,40	5,35
2014	4,30	5,12
2015	4,58	5,42
2016	4,47	5,23
2017	4,49	5,20
2018	4,40	5,03

Sumber: BPS, Susenas 2011-2018 (kondisi Maret)

7.2 GARIS KEMISKINAN (GK) INDEKS KEDALAMAN KEMISKINAN (P1) DAN INDEKS KEPARAHAN KEMISKINAN (P2).

Garis kemiskinan pada dasarnya merupakan standar minimum yang diperlukan oleh seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, termasuk kebutuhan makanan dan non makanan. Data yang digunakan untuk penghitungan kemiskinan di banyak negara berkembang menggunakan data pengeluaran bukan data pendapatan, hal ini karena data pendapatan yang diperoleh cenderung tidak lengkap atau *under estimation* sehingga digunakanlah data pengeluaran sebagai *proxy* dari pendapatan untuk mendefinisikan batas dari standar minimum kebutuhan makanan dan bukan makanan.

Pengukuran kemiskinan tidak terbatas mengenai jumlah penduduk miskin tapi juga mengevaluasi ketimpangan dan keparahan kemiskinan yang diindikasikan oleh Indeks kedalaman kemiskinan atau *proverty gap index* (Pi) dan Indeks keparahan kemiskinan atau *Proverty security index* (P2). Indeks kedalaman kemiskinan (P1) memberikan gambaran seberapa jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin relatif terhadap garis kemiskinan (GK). Penurunan pada P1 mengindikasikan adanya perbaikan secara rata-rata pada kesenjangan antara standar hidup penduduk miskin dibandingkan dengan garis kemiskinan. Indeks keparahan kemiskinan (P2) mengilustrasikan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Tabel 7.2 Garis Kemiskinan , Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Tahun 2014-2016

Indikator	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)
Garis Kemiskinan	392.970	412.231	431.368
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	0,90	0,59	0,68
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0,22	0,14	0,24

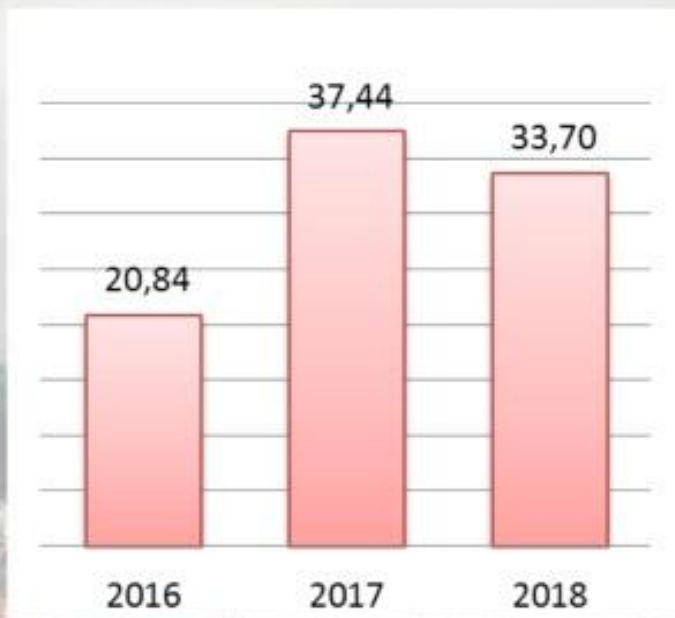
Sumber: BPS, Susenas 2011-2018 (kondisi Maret)

Garis kemiskinan Kota Pariaman dari tahun 2016-2018 mengalami peningkatan dari Rp. 392.970,- pada Maret 2016 menjadi Rp. 412.231,- pada Maret 2017 dan menjadi Rp. 431.368,- dan pada Maret 2018.

Selain GK, rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan yaitu ukuran untuk mengukur kesenjangan pengeluaran disebut sebagai Indeks

Kedalaman Kemiskinan (P1). Ukuran lainnya untuk melihat kondisikemiskinan adalah Indeks KeparahanKemiskinan (P2). P2 memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin.

Pada periode Maret 2016-Maret 2018, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) mengalami penurunan dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) mengalami peningkatan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dari 0,90 pada tahun 2016 turun menjadi 0,68 di tahun 2018. Lain halnya dengan Indeks Keparahan Kemiskinan yang mengalami peningkatan dari 0,22 di tahun 2016 menjadi 0,24 di tahun 2018. Kenaikan P1 mengindikasikan rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung mendekati garis kemiskinan, namun kesenjangan pengeluaran antar penduduk miskin meningkat (ditunjukkan dengan P2 yang meningkat).



Persentase Rumah Tangga yang Menerima Kredit Usaha Selama Setahun Terakhir

Dalam dua tahun terakhir, persentase rumah tangga yang menerima kredit usaha cukup besar yaitu 37,44 persen di tahun 2017 dan 33,70 persen di tahun 2018

BAB VIII SOSIAL LAINNYA

8. SOSIAL LAINNYA

Perubahan zaman telah memaksa masyarakat untuk beradaptasi terhadap semua perubahan yang terjadi. Tingkat kebutuhan mulai bergeser, dari kebutuhan sekunder atau tersier menjadi kebutuhan primer seperti berlibur atau berwisata, eksistensi di tengah masyarakat, dan mengakses teknologi informasi dan komunikasi. Pertukaran informasi yang cepat antar daerah menjadi kebutuhan utama yang tidak terhindarkan dalam menunjang keberlangsungan hidup orang banyak.

Globalisasi telah mendorong perubahan pola hidup masyarakat. Teknologi yang semakin canggih membuat akses dunia tanpa batas. Begitu juga tingkat kebutuhan masyarakat yang mulai mengalami pergeseran, dari kebutuhan sekunder atau tersier dulunya menjadi kebutuhan primer, seperti berlibur atau berwisata, eksistensi di tengah masyarakat, dan mengakses teknologi informasi dan komunikasi. Pertukaran informasi yang cepat antar daerah dan negara menjadi kebutuhan utama yang tidak terhindarkan dalam menunjang keberlangsungan hidup orang banyak.

8.1 AKSES PADA TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI

Perubahan zaman juga membawa pengaruh pada kebiasaan individu, pola kebutuhan mulai bergeser. Kebutuhan akan perkembangan informasi semakin meningkat. Tak dapat dipungkiri bahwa kemajuan Teknologi, informasi dan Komunikasi (TIK) adalah salah satu kekuatan pendorong globalisasi dan pesatnya pertumbuhan ekonomi bangsa. Kemajuan di bidang teknologi informasi

memberikan dampak yang positif bagi masyarakat. Potensi TIK jika dikembangkan secara optimal dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Semakin banyak penduduk yang memiliki akses TIK dan terus mengikuti kemajuan teknologi, maka dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk.

Tabel 8.1 Persentase Rumah Tangga yang Mempunyai Akses Teknologi Informasi Menurut Alat Komunikasi dan Informasi Kota Pariaman, 2017-2018

Alat Komunikasi dan Informasi	2017	2018
(1)	(2)	(3)
Telepon Selular	66,56	65,99
Komputer/laptop	29,05	34,96
Akses Internet	43,19	45,58

Sumber: BPS, Susenas 2017-2018

Persentase rumah tangga yang mempunyai akses teknologi informasi dan komunikasi dengan alat komunikasi telepon selular, komputer, dan akses internet mengalami peningkatan pada tahun 2018 dibandingkan tahun 2017. Persentase rumah tangga yang mempunyai komputer/ laptop meningkat dari 29,05 persen di tahun 2017 menjadi 34,96 persen hal ini seiring juga dengan peningkatan penduduk yang mengakses internet.

Persentase penduduk yang melakukan akses internet di tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 2,39 persen dibandingkan tahun 2017. Perkembangan teknologi yang semakin pesat membuat masyarakat semakin haus akan informasi atau berita apa yang sedang terjadi diseluruh belahan dunia. Betapa besarnya pengaruh internet di era milenial ini, mulai usia muda hingga usia tua aktif dijejaring

sosial mengikuti perkembangan masa kini. Dunia tanpa sekat tanpa batas dewasa ini akan menambah deretan masyarakat yang berpindah menggunakan internet untuk mempermudah dalam kehidupan sehari-hari.

Tabel 8.2 Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Mengakses Internet (Termasuk Facebook, Twitter, BBM, Whatsapp) dalam 3 Bulan Terakhir Menurut Jenis Kelamin, 2017 dan 2018

Jenis Kelamin	2017	2018
(1)	(2)	(3)
Laki-laki	43,36	46,24
Perempuan	43,03	44,95
Laki-laki+perempuan	43,19	45,58

Sumber: BPS, Susenas 2017-2018

8.2 TINDAK KEJAHATAN

Keamanan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesejahteraan rakyat. Rasa aman dari tidak kejahatan menjadi salah satu indikator penting yang mencerminkan rakyat sejahtera dan menjadi salah satu aspek penyusunan Indeks Kebahagiaan Indonesia oleh BPS. Tindak kejahatan adalah segala tindakan yang disengaja atau tidak, telah terjadi atau baru percobaan, yang dapat merugikan orang lain dalam hal badan, jiwa, harta benda, kehormatan, dan lainnya serta tindakan tersebut diancam hukuman penjara dan kurungan. Tindak kejahatan atau kriminalitas umumnya terjadi akibat dari kesenjangan sosial dan ekonomi suatu negara, serta bisa bersumber dari kantor politik.

Tabel 8.3 Persentase Penduduk yang Pernah Menjadi Korban Kejahatan di Kota Pariaman, 2017-2018

Jenis Kelamin	2017	2018
(1)	(2)	(3)
Laki-laki	1,72	1,39
Perempuan	1,04	1,35
Laki-laki+perempuan	1,37	1,37

Sumber: BPS, Susenas 2017-2018

Persentase penduduk yang pernah menjadi korban kejahatan di Kota Pariaman tahun 2017 dan 2018 adalah sebesar 1,37 persen dan yang paling sering menjadi korban adalah perempuan dengan persentase sebesar 1,72 persen di tahun 2017 dan 1,39 persen di tahun 2018.

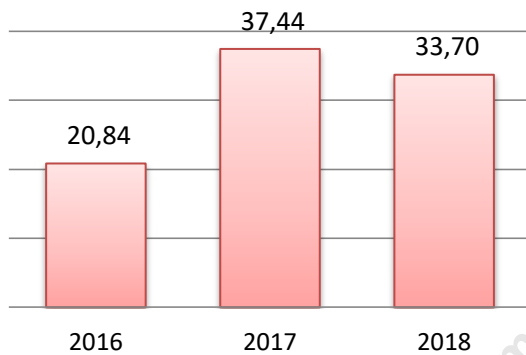
8.3 PERLINDUNGAN SOSIAL

Kredit usaha pada umumnya diberikan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagai bantuan modal dan pembiayaan bagi usaha produktif. Kredit usaha umumnya diberikan oleh lembaga keuangan seperti bank umum atau Bank Perkreditan Rakyat (BPR), modal ventura, Program Pengembangan Usaha Kecil dan Koperasi (PUKK), pegadaian, dan sebagainya. Dalam SUSENAS, kredit usaha bisa berupa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), Kredit Usaha Rakyat (KUR), program Bank selain KUR, KUBE/KUB, program koperasi, perorangan (dengan bunga), dan lainnya.

Dalam dua tahun terakhir, persentase rumah tangga yang menerima kredit usaha cukup besar yaitu 37,44 persen di tahun 2017 dan 33,70 persen di tahun 2018. Kredit usaha sangat bermanfaat terutama bagi rumah tangga miskin dan pelaku usaha mikro dalam menopang perekonomian Kota Pariaman. Peningkatan

persentase rumah tangga yang menerima kredit usaha menggambarkan minat masyarakat semakin meningkat untuk memperoleh kredit usaha, terutama dari lembaga keuangan atau bank. Masyarakat cenderung memilih pinjaman di lembaga keuangan perorangan atau bank plecit karena persyaratan pengajuan yang lebih mudah dan cepat cair.

Gambar 8.1 Persentase Rumah Tangga yang Menerima Kredit Usaha Selama Setahun Terakhir di Kota Pariaman, 2016-2018



Sumber: BPS, Susenas 2016-2018

Salah satu program perlindungan sosial adalah dengan memberikan bantuan beras kepada rumah tangga miskin (raskin). Persentase rumah tangga yang menerima raskin pada tahun 2018 mencapai 18,27 persen lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan jumlah yang dibeli atau diterima, persentase penerima raskin pada tahun 2018 penduduk paling banyak menerima raskin di bawah 15 kg sebanyak 50,41 persen. Hal ini dikarenakan masih ada yang meminta beras raskin diluar daftar nama yang telah ditentukan sehingga dibuat kebijakan untuk pembagian rata di berbagai desa maupun kelurahan. Namun terdapat pula masyarakat yang menerima raskin di atas 45 kg yaitu sebesar 5,84 persen.

Tabel 8.4 Persentase Rumah Tangga yang Membeli/Menerima Beras Miskin (Raskin) Selama 4 Bulan Terakhir Menurut Jumlah Beras yang Dibeli/Diterima, 2018

Tahun	% RT yang Membeli Raskin	Jumlah beras yang dibeli/diterima (Kg)			
		<15	15-29	30-45	>45
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2015	19,78	66,26	30,16	3,57	0
2016	20,56	74,63	21,45	3,92	0
2017	24,49	54,63	37,14	8,23	0
2018	18,27	50,41	33,35	10,4	5,84

Sumber: BPS, Susenas 2015-2018

Bantuan lainnya yang diberikan pada rumah tangga miskin adalah berupa kartu perlindungan sosial. Kartu Perlindungan Sosial (KPS) merupakan kartu yang diterbitkan oleh Pemerintah sebagai penanda Rumah Tangga Miskin (www.tnp2k.go.id). Kartu ini dapat digunakan untuk memperoleh program raskin, program Bantuan Siswa Miskin (BSM), serta Program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM).

Tabel 8.5 Persentase Rumah Tangga yang Menerima Kartu Perlindungan Sosial (KPS)/ Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), 2018

Tahun	Ya, Dapat Menunjukkan Kartu	Ya, Tidak Dapat Menunjukkan Kartu	Tidak punya	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2015	10,58	5,49	83,93	100,00
2016	9,34	5,00	85,66	100,00
2017	7,01	2,99	90,00	100,00
2018	11,15	2,81	86,04	100,00

Sumber: BPS, Susenas 2015-2018

Persentase rumah tangga yang mendapatkan kartu KPS adalah sekitar 10,00 persen pada tahun 2017 dan meningkat menjadi 13,96 persen ditahun

2018. Rumah tangga yang mempunyai kartu, yang dapat menunjukkan kartu pada tahun 2018 sebesar 11,15 persen dan yang tidak dapat menunjukkan kartu sebesar 2,81 persen.

Tabel 8.6 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki atau Menerima Jaminan Sosial Selama Setahun Terakhir Menurut dan Jenis Jaminan Sosial, 2018

Tahun	Jaminan Pensiun/Veteran	Jaminan Hari Tua	Asuransi Kecelakaan Kerja	Jaminan/Asuransi Kematian	Pesangon Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2015	10,01	0,81	0,48	0,29	-
2016	18,56	15,85	2,82	14,05	-
2017	17,16	17,49	16,72	15,89	1,17
2018	23,02	21,42	21,97	22,51	1,75

Sumber: BPS, Susenas 2015-2018

Selain bantuan langsung kepada rumah tangga miskin, Jaminan sosial sangat bermanfaat untuk membantu rumah tangga agar tidak rentan terhadap kemiskinan. Jaminan sosial dalam publikasi ini mencakup jaminan pensiun/veteran, jaminan hari tua, asuransi kecelakaan kerja, jaminan/asuransi kematian, serta pesangon pemutusan hubungan kerja (PHK).

Persentase rumah tangga pada tahun 2018 yang memperoleh jaminan Pensiun cukup besar di Kota Pariaman yaitu sebesar 23,02 persen, jaminan hari tua sebesar 21,41 persen, Asuransi kecelakaan kerja sebesar 21,97 persen dan jaminan kematian sebesar 22,51 persen. Jaminan ini paling umum dijumpai pada rumah tangga yang memiliki anggota rumah tangga pegawai negeri sipil. Rumah tangga yang memiliki pesangon pemutusan kerja atau PHK hanya sebesar 1,75 persen.



Sensus
Penduduk
2020

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

<https://pariamankota.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA PARIAMAN**

Jl. Sentot Alibasa, Jati Hilir

Telp./Fax. 0751-93785; Email: bps1377@bps.go.id

Website: <http://pariamankota.bps.go.id>

ISBN 978-602-1390-77-1



9 786021 390771